

Drs. Bambang Budiono M.S., M.Sosio.
& Tim Rangkul

PREVENTING VIOLENCE EXTREMISM

Modul Pelatihan Membangun Sistem Pencegahan
Dini Untuk Menanggulangi Ekstrimisme Berbasis
Kekerasan Di Sekolah Melalui Pendekatan
Keamanan Manusia



Preventing Violence Extremism

**Modul Pelatihan Membangun Sistem Pencegahan Dini Untuk
Menanggulangi Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Di Sekolah
Melalui Pendekatan Keamanan Manusia**

Oleh:

Drs. Bambang Budiono M.S., M.Sosio.

Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.

Muflih Wahid Hamid, M.Psi. T

Diterbitkan oleh:

Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya

Jl. Karang Menur IV No. 14, Surabaya, Jawa Timur

Email: pusham.surabaya@gmail.com

Preventing Violence Extremism

Modul Pelatihan Membangun Sistem Pencegahan Dini Untuk
Menanggulangi Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Di Sekolah
Melalui Pendekatan Keamanan Manusia

Penulis

Drs. Bambang Budiono M.S., M.Sosio.

Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.

Muflih Wahid Hamid, M.Psi. T

Editor

Akhsaniyah, S.Sos., M.Med.Kom.

Diterbitkan oleh:

Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya

Jl. Karang Menur IV No. 14, Surabaya, Jawa Timur

Email: pusham.surabaya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Aksi-aksi terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme berawal dari struktur nalar keagamaan yang keliru. Agama ditafsirkan sebagai pembenar untuk melakukan kekerasan, bahkan untuk membunuh sesama manusia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah kelam terhadap aksi-aksi terorisme. Indonesia dihadapkan pada aksi terorisme sejak tahun 1981, ketika 5 orang yang mengaku berasal dari Komando Jihad membajak Pesawat Garuda 206 dari Jakarta menuju Medan. Aksi terorisme kedua terjadi pada 21 Januari 1985, Candi Borobudur Magelang dibom oleh sekelompok orang bermotifkan Jihad. Periode tahun 2000-2005 adalah periode kelam aksi terorisme di Indonesia. Setidaknya dalam periode tersebut, tercatat ada 21 aksi terorisme yang menyasar pelbagai kota di Indonesia. Akibatnya tidak sembarangan, ratusan orang meninggal dunia, dan ratusan lagi mengalami luka-luka. Tidak berhenti sampai di situ. Meski sempat vakum pada periode 2006-2008, Aksi terorisme kembali terulang di tahun 2009-2013. Tercatat pada periode ini terdapat 8 aksi terorisme yang lebih banyak menyasar simbol-simbol kenegaraan. Di tahun 2014-2015 aksi terorisme sempat berhenti, tetapi di tahun 2016 dan tahun 2018, aksi terorisme mencuat kembali.

Baru-baru ini, Kota Surabaya dihentakkan oleh aksi bom bunuh diri di 3 Gereja. Berjarak hanya 3 hari setelah serangan terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Keesokan harinya dilanjutkan dengan aksi massif para teroris di beberapa titik, Ruko Wonocolo Sidoarjo, dan Kantor Polrestabes Surabaya. Penyisiran dan penangkapan terhadap kelompok teroris pun dilakukan oleh aparat kepolisian. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang adalah tiga tempat ditemukannya lokasi persembunyian pelaku teroris. Mereka pun ditangkap oleh tim densus 88, dan beberapa lainnya ditembak mati karena melawan petugas. Belum berhenti

sampai di situ. tidak sampai 1 minggu pasca serangan di Kota Surabaya dan Sidoarjo, pelaku terorisme kembali beraksi. Kini Mapolda Riau di Kota Pekanbaru yang diserang. Pelakunya ditembak mati, namun 1 orang polisi harus merelakan nyawanya akibat aksi terorisme tersebut.

Seperti yang kita ketahui di media massa, penyidikan aparat kepolisian menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah paham keagamaan yang melatarbelakangi aksi terorisme sudah mengendap lama di otak para pelaku. Bahkan sejak masih duduk di bangku kuliah, para pelaku terorisme sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengajarkan jihad dengan cara kekerasan. Kampus memang tempat bersemainya pengkaderan bagi kelompok-kelompok teroris dan ekstrimis. Riset Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Corak, Penyebaran, dan Aksesibilitas Literatur Kelslaman di Kalangan Generasi Milenial” misalnya, menyatakan bahwa literatur generasi muda Indonesia telah dipenuhi oleh buku-buku jihadis. Di antaranya buku jihadi yang laku dan mengemuka adalah *Tarbiyah Jihadiyah* karya Abdullah Azzam, dan *Jihad Jalan Kami* karya Abdul Baqi Ramdhun. Literatur lain yang mengemuka di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah buku-buku terjemahan karya Taqiyyuddin An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum.

Tidak heran jika lingkungan sekitar perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menjadi lahan bagi para teroris untuk mencari dan merekrut para pengantin. Apalagi jika sarana dan lingkungannya telah menyediakan ruang untuk itu. Faktanya, di sekitar perguruan tinggi dan sekolah-sekolah selalu menjamur kos-kosan dan rumah kontrakan. Inilah sarana para teroris untuk mencekoki anak-anak muda, pelajar, maupun mahasiswa dengan paham-paham keagamaan yang berujung pada aksi terorisme.

Deteksi dini menjadi solusi awal untuk melawan persemaian paham-paham jihadis di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah-

sekolah tersebut. Modul ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya Program GUYUB Indonesia dan Pusham Surabaya dalam pencegahan ekstremisme dan radikalisme di lingkungan sekitar sekolah yang juga menjadi perhatian pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach) digunakan sebagai panduan dalam penulisan modul ini yang merupakan konsep pemersatu dengan menunjukkan inisiatif yang efektif, dipimpin oleh komunitas, dan berpusat pada masyarakat untuk mencegah ekstremisme kekerasan melalui praktik metodologi terbaik yang mendukung visi dari rencana Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (PVE). Secara khusus, modul ini adalah instrumen yang dapat digunakan oleh fasilitator untuk melatih Guru-Guru di Sekolah Menengah Atas. Terutama untuk mengasah keterampilan Guru menjadi fasilitator di dalam ruang kelas. Bagaimanapun, Guru memiliki peran yang sangat penting di dalam Lembaga Pendidikan. Guru adalah ujung tombak pencetak masa depan generasi bangsa.

Johan Avie
Direktur Yayasan Pusham Surabaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENDAHULUAN	1
Tujuan Modul	4
Prinsip-Prinsip.....	4
Penerima Manfaat.....	5
Apa Isi Modul Pelatihan Ini?	6
Bagaimana Menggunakan Modul Ini?	6
Daftar Isi Dan Waktu Kegiatan.....	8
BAGIAN I	9
MENCIPTAKAN SUASANA BELAJAR.....	9
Sesi I Pembukaan.....	9
Tujuan.....	9
Metode	10
Waktu	10
Bahan dan Alat	10
Aktivitas.....	10
Sesi II Perkenalan.....	11
Sesi III Menggambar Diri.....	13
Sesi IV Kontrak Belajar	14
BAGIAN II	17
MENGENAL KONSEP FUNDAMENTALISME, RADIKALISME, EKSTRIMISME DAN TERORISME	17
Sesi I Menggali Pemahaman Peserta Tentang Konsep Yang Terkait Dengan Ekstrimisme.....	17
Lembar Bacaan	19
Sesi II Memahami Peran Perempuan Di Tengah Isu Ekstremisme	28
Lembar Bacaan	31
Sesi III Mengenal Konsep Dan Ciri-Ciri Ekstrimisme Dengan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah	37
TUGAS/PERTANYAAN PEMANDU DISKUSI KELOMPOK	39

TABEL UNTUK KELOMPOK 2	40
BAGIAN III	41
MENKRITISI PENGARUH MEDIA SOSIAL TERKAIT EKSTRIMISME DI SEKOLAH.....	41
Sesi I Distorsi Komunikasi	41
Sesi II Mencegah Pengaruh Berita Hoax Dan Provokatif	43
BAGIAN IV.....	45
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DINI EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH.....	45
Sesi I Membuat Soal	45
Sesi II Pendampingan Kasus.....	47
Lembar Kasus.....	48
Sesi III Menyelamatkan Sang Saka.....	50
Sesi IV Merumuskan Pedoman Pencegahan Dini Ekstrimisme Dengan Kekerasan Di Sekolah	51
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 1	53
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 2	53
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 3	53
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 4	53
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 5	54
LEMBAR BACAAN.....	54
Komite Gabungan	63

PENDAHULUAN

Upaya untuk mencegah ekstrimisme di sekolah harus terus menerus dilakukan, mengingat maraknya gejala ini di lingkungan guru dan siswa. Survey yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan 76,2% guru dan 84% siswa yang menjadi responden mendukung peraturan negara berdasarkan agama (Kompas, 19 Februari 2016); Selain itu Kompas tanggal 8 Maret 2016 memberitakan hasil survei LIPI yang menyebutkan ada 52% siswa yang setuju cara kekerasan semi solidaritas agama; 14% siswa juga menyatakan setuju peledakan bom sebagai jalan perjuangan agama.

Sementara itu survei yang baru-baru ini dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyatakan 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak Ketua OSIS dari agama berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang merasa lebih nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama. Penelitian ini menasar siswa SMA/Sederajat, guru, hingga kepala sekolah di dua SMA Negeri dan dua SMA swasta di Salatiga, Jawa Tengah, serta Singkawang, Kalimantan Barat. Kemdikbud melakukan penelitian ini pada Juli-September 2016 didasari meningkatnya sentimen konflik agama dan ras di Indonesia, termasuk diskriminasi dan dominasi etnis mayoritas terhadap minoritas.

Survei yang baru-baru ini dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian itu menyatakan 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak Ketua OSIS dari agama berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang merasa lebih nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama.

Penelitian itu awalnya menyigi intoleransi yang terjadi di sekolah. Kecenderungannya, sekolah negeri ternyata menjadi ladang meningkatnya intoleransi dibanding SMA swasta berbasis agama. Penelitian ini menasar siswa SMA/ sederajat, guru, hingga

kepala sekolah di dua SMA Negeri dan dua SMA swasta di Salatiga, Jawa Tengah, serta Singkawang, Kalimantan Barat. Kemdikbud melakukan penelitian ini pada Juli-September 2016 didasari meningkatnya sentimen konflik agama dan ras di Indonesia, termasuk diskriminasi dan dominasi etnis mayoritas terhadap minoritas.

Dari survei tersebut ditemukan juga bahwa 8,5 persen setuju dasar negara diganti dengan agama, dan 7,2 persen setuju (eksistensi) gerakan ISIS,” kata Nur Berlian Venus Ali Peneliti Kemendikbud, kepada *Kompas.com*.

Tulisan yang dibuat oleh Arzia Tivani (www.vice.com) menyebutkan Riset sejenis tidak hanya dilakukan Kemendikbud. SETARA Institute—lembaga swadaya yang berkonsentrasi pada kajian demokrasi dan intoleransi—menjumpai kecenderungan senada. Studi SETARA Institute yang dilansir tahun lalu meneliti siswa SMA di Jakarta dan Bandung. Hasilnya menunjukkan bila 8,5 persen responden mereka setuju jika dasar negara Pancasila diganti dengan aturan agama.

Setara Institute juga menemukan sekolah negeri yang seharusnya berada di garda depan pembentukan karakter bangsa berbasis pada pluralisme justru menjadi institusi yang berperan paling dominan dalam transmisi pengetahuan agama. Data hasil riset yang disajikan Setara Institute ada 12 orang responden yang setuju dasar negara RI diubah menjadi berbasis agama

Berdasarkan penelitian yang dilakukan SETARA, ditemukan sekian pola penanaman ide-ide intoleransi di kalangan siswa SMA, diantaranya melalui guru, kurikulum, dan perjumpaan dengan alumni melalui sistem mentoring keagamaan. Dalam kegiatan mentoring, biasanya alumni akan membimbing pelajar SMA mengaji, disertai dialog-dialog bertema keagamaan. Mentoring digelar atas alasan kurangnya jam pelajaran agama yang hanya dua

jam dalam seminggu. Dari kegiatan itulah penyebaran ideologi tertentu dimulai.

Dampak mentoring maupun penyebaran wacana lewat kurikulum dan materi ajar guru sudah berdampak pada lonjakan radikalisme. Buku-buku pelajaran juga ditengarai menyebarkan paham intoleransi, bahkan sejak fase pendidikan prasekolah. Contohnya adalah buku teks di TK Kota Depok, Jawa Barat, yang mengajarkan nyanyian pada anak-anak memakai lirik “sya-hid di me-dan ji-had”. Di buku yang sama, ada pula cerita mengenai bom.

Temuan sejenis didapatkan dari buku pelajaran SMA di Bandung, yang salah satu babnya menampilkan materi “kebangkitan prajurit Islam”. Salah satu kutipan kalimat di buku itu misalnya, “semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh.” Buku serupa ditemukan otoritas pendidikan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menyita seluruh buku tersebut dan menghapuskannya dari daftar referensi kurikulum nasional.

Tidak hanya potensi intoleransi, radikalisme agama pun makin merajalela. Sebelumnya, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) merilis hasil riset potensi radikalisme di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 50 persen pelajar setuju akan tindakan berbasis radikalisme. Masih dalam penelitian yang sama, potensi radikalisme terdeteksi, 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan diterapkan di Indonesia. Data ini menunjukkan 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Adapun sekitar 52,3 persen siswa menyetujui kekerasan demi solidaritas agama, dan 14,2 persen membenarkan serangan teror bom.

Gambaran mengenai radikalisme berbasis agama dan ekstrimisme dengan kekerasan ini tidak hanya monopoli Islam saja. Daerah-daerah yang mayoritas warganya non-muslim juga berusaha untuk membangun peraturan publik berbasis agama mereka.

Tujuan Modul

Modul pelatihan ini bertujuan agar (1) para guru yang dilatih dapat mengenali berbagai gejala ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah (2) para guru yang dilatih **memiliki komitmen** untuk melakukan pencegahan dini terhadap berbagai upaya dari pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan civitas akademika sekolah sebagai pelaku tindak ekstrimisme dengan kekerasan (3) para guru, melalui sekolahnya dapat melakukan pencegahan dini dengan menggunakan pendekatan multi stakeholder sebagai mekanisme sistemiknya.

Prinsip-Prinsip

Prinsip penting dari modul ini adalah prinsip Andragogi. Prinsip ini harus diperhatikan dan menjadi pegangan utama oleh pengguna modul pelatihan ini. Prinsip Andragogi mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang khas dan unik, termasuk pengalaman dengan masalah-masalah yang terkait dengan ekstremisme kekerasan. Dengan pengalaman, yang dimaksud di sini bukan berarti hanya ikut kegiatan secara langsung, tetapi termasuk juga pernah mendengar cerita informasi dari orang lain, pernah membaca, menafsirkan serta memahami berbagai gejala terkait dengan ekstrimisme, termasuk ekstrimisme dengan kekerasan. Semua pengalamannya itu membentuk pengetahuan dan dunia kehidupan (*lebenswelt*) seseorang. Oleh karena dunia kehidupan mereka bersifat subyektif, maka apa yang mereka ketahui, tafsirkan, mereka maknai dan mereka pahami tidak bisa dihakimi

sebagai sesuatu yang salah atau benar. Orang luar diharapkan memahami dunia kehidupan orang-orang lain. Dalam kacamata Ki Hajar Dewantara, *setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolah*. Ungkapan ini mengandung arti bahwa setiap orang dapat dipastikan mengetahui dengan mendalam dunia kehidupan mereka sendiri. Demikianlah, bagi guru, dunia kehidupan sebagai guru dengan lingkungannya adalah dunia yang mereka pahami dan hayati.

Atas dasar uraian di atas, maka modul pelatihan ini bersandar pada asumsi bahwa peserta pelatihan ini adalah orang-orang yang telah memiliki pengetahuan maupun pengalaman mengenai ekstremisme dengan kekerasan, yang tentu saja berbeda antara peserta laki-laki dan perempuan. Baik dengan cara mendengar, membaca, mempersepsi, maupun melalui pengalaman langsung. Modul ini tidak ingin menjadikan para penggunanya sebagai pihak yang lebih tahu, lebih hebat, atau lebih tinggi pengetahuannya daripada para peserta pelatihan. Suasana pelatihan yang hendak dibangun adalah suasana partisipatif dimana komunikasi yang bersifat intersubjektivitas terbangun dengan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara peserta laki-laki dan perempuan

Penerima Manfaat

Siapakah penerima manfaat dari pelatihan yang menggunakan modul ini? Civitas akademika sekolah, terutama guru, adalah para penerima manfaat pelatihan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diikuti modul ini, maka guru maupun sivitas akademika sekolah yang mengikuti pelatihan harus diasumsikan sebagai orang-orang yang telah memiliki pengalaman, terkait apa itu ekstrimisme dengan kekerasan, bagaimana mencegahnya, bahkan mengatasinya. Mereka bukanlah “tabung kosong” yang harus diisi dengan materi muatan tentang ekstrimisme dengan kekerasan.

Oleh karena itu sejauh-jauhnya pelatihan ini berusaha untuk membantu menstrukturkan kembali pengalaman-pengalaman para guru dan civitas akademika yang menjadi manfaat pelatihan dengan modul ini.

Apa Isi Modul Pelatihan Ini?

Modul Pelatihan Pencegahan Dini Ekstrimisme dengan Kekerasan di Sekolah ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama terkait dengan sesi mencairkan suasana pelatihan. Bagian kedua berkaitan dengan pengenalan beberapa konsep terkait dengan ekstrimisme. Bagian ketiga terkait dengan pengembangan atau penguatan komitmen para peserta pelatihan terkait dengan upaya pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah, dan keempat terkait dengan bagaimana mekanisme pencegahan dan praktik pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah.

Bagaimana Menggunakan Modul Ini?

Modul ini pada pokoknya terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dan dijalankan pada setiap sesi pelatihan. Bagian kedua berisi lembar bacaan yang harus dibaca oleh peserta untuk mendalami konsep-konsep teoritis terkait dengan ekstremisme, fundamentalisme serta terorisme. Lembar bacaan yang ada di bagian kedua ini hanya boleh dibagikan kepada peserta sesudah sesi mengenai topik pada lembar bacaan itu selesai dilaksanakan.

Langkah-langkah pada setiap sesi pelatihan merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pemandu pelatihan (fasilitator), agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Patut diperhatikan juga bahwa modul ini merupakan panduan, yang tidak harus diikuti secara kaku. Sebab ada kalanya dinamika

kelas menuntut kreativitas fasilitator untuk melakukan improvisasi, menambahkan atau mengurangi beberapa bagian dari langkah-langkah teknis yang ada dalam petunjuk di sesi terkait.

Sejak mula sudah harus dipahami oleh para calon pengguna, bahwa modul ini hendak menyajikan tiga hal. Pertama, memberikan panduan bagaimana membangun suasana pelatihan yang rileks, terbuka dan penuh persahabatan. Kedua, modul ini memberikan panduan untuk secara partisipatif membangun pengertian mengenai konsep-konsep yang terkait dengan ekstrimisme yang dibedakan melalui perspektif gender. Ketiga, manual ini memberikan panduan bagaimana membangun kemampuan mengembangkan empati dan komitmen peserta untuk melakukan pencegahan terhadap ekstrimisme dengan kekerasan melalui program yang bisa mereka tindaklanjuti pasca pelatihan. Mereka yang akan menggunakan modul ini diharapkan mampu memandu dan mendorong agar peserta memiliki motivasi baru, kesadaran baru dan keterampilan baru tentang pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah.

Daftar Isi Dan Waktu Kegiatan

Materi	Menit
Kata Pengantar	30
Tujuan Modul	30
Prinsip-Prinsip	30
Penerima Manfaat	30
Apa Isi Modul	60
Bagaimana Modul Digunakan	60
Menciptakan Suasana Belajar	60
Pembukaan	60
Perkenalan	60
Menggambar Diri	120
Kontrak Belajar	75
Memahami Peran Perempuan di Tengah Isu Ekstremisme	180
Mengenal Konsep Fundamentalisme, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme	180
Mengenal Konsep dan Ciri-ciri Ekstremisme dengan Kekerasan di Sekolah	180
Distorsi Komunikasi	90
Mencegah pengaruh Berita Hoax dan Provokatif	60
Membangun Sistem Pencegahan Dini Ekstremisme Dengan Kekerasan di Sekolah: Membuat Soal	90
Membangun Sistem Pencegahan Dini Ekstremisme Dengan Kekerasan di Sekolah: Pendampingan Kasus	90
Menyelamatkan Sang Saka	60
Merumuskan Pedoman Pencegahan Dini Ekstremisme dengan Kekerasan di Sekolah	90
Total	1.695

BAGIAN I

MENCIPTAKAN SUASANA

BELAJAR

Sesi I Pembukaan

Acara pembukaan biasanya diisi dengan ucapan selamat datang, penjelasan singkat panitia, sambutan-sambutan dan sebagainya. Lebih baik jika acara ini dilakukan sesingkat mungkin. Apabila ada pejabat pemerintahan yang hadir, biasanya acara seremonial dilakukan sedemikian rumit dan sakral. Dalam keadaan ini ada baiknya panitia melakukan negosiasi agar seremonial itu tidak membosankan peserta. Jika acara seremonialnya sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan materi berikutnya.

Tujuan

1. Peserta dan Fasilitator saling memperoleh sejumlah informasi baik teknis maupun non-teknis mengenai penyelenggaraan pelatihan, seperti pokok-pokok utama bahasan pelatihan, urutan acara dan tata laksana penyelenggaraan pelatihan.
2. Mengenalkan metode pelatihan pada peserta dan juga dikenalkan bahwa pelatihan ini pelatihan yang bersifat

partisipatif, keterlibatan peserta di dalam seluruh rangkaian proses menjadi sangat penting.

3. Mengajak peserta dan fasilitator untuk bersama-sama memfokuskan perhatian pada landasan pemikiran, maksud, tujuan dan substansi latihan dalam konteks pelaksanaan program Pencegahan Dini Ekstrimisme dengan Kekerasan di Sekolah.

Metode

Curah Pendapat

Waktu

60 menit

Bahan dan Alat

Seperangkat alat belajar (training kit)

Susunan acara yang telah dibuat oleh panitia

Aktivitas

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat hal-hal yang bersifat teknis (seperti pentingnya protokol kesehatan dll.) dan non teknis (seperti komitmen peserta, dll.) yang harus diketahui peserta selama pelatihan
2. Fasilitator menyampaikan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan serta substansi latihan dalam konteks mencapai tujuan dalam upaya Pencegahan Dini Ekstrimisme dengan Kekerasan di Sekolah.
3. Tanya jawab mengenai maksud, tujuan dan substansi pelatihan.
4. Rangkuman hasil tanya jawab

Sesi II Perkenalan

Tujuan	Mengajak peserta untuk saling mengenal secara lebih mendalam tentang identitas mereka masing-masing secara lebih dalam
Pokok Bahasan	Mencari Atribut dan Menemukan Pemiliknya
Metode	Permainan
Waktu	60 menit
Bahan dan Alat	1.Sandal atau sepatu milik peserta 2.Kertas metaplan untuk setiap peserta 3.ballpoint sejumlah peserta
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan diajak untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain melalui permainan2. Mintalah peserta untuk melepas salah satu sepatu atau sandal yang mereka pergunakan, boleh yang kiri saja atau yang kanan saja3. Minta kepada peserta untuk meletakkan salah satu sepatu atau sandal mereka di luar kelas atau di luar ruangan, dan minta mereka untuk masuk kembali4. Sesudah semua peserta berada di ruangan kembali, mintalah kepada mereka untuk mengambil sandal atau sepatu <i>yang bukan miliknya</i>5. Mintalah kepada peserta untuk mencari pemilik sepatu yang mereka ambil6. Sesudah mereka menemukan pemiliknya, mintalah mereka untuk berkenalan dengan (1) mengamati ciri khas/penting dari pasangannya; (2) menanyakan identitasnya, dan (3) menanyakan pengalamannya (pernah mendengar, membaca atau menyaksikan) terkait dengan masalah

	<p>ekstrimisme dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah mereka. Pengalaman terkait masalah ekstremisme kekerasan harus dilihat berdasarkan perspektif gender, sehingga para peserta dapat memahami secara jelas perbedaan-perbedaan yang dialami oleh peserta laki-laki dan perempuan untuk mencari, akibat solusi yang tepat.</p> <p>7. Sesudah semua saling berkenalan, mintalah peserta untuk berdiri melingkar</p> <p>8. Minta kepada setiap peserta untuk memperkenalkan “teman” yang tadi diwawancarai. Peserta yang diperkenalkan diminta untuk berdiri agak lebih maju ke depan</p> <p>9. Sesudah semua saling berkenalan, fasilitator meminta peserta untuk memaknai sesi perkenalan ini dengan mengajukan pertanyaan “<i>pelajaran apa yang didapat oleh peserta dalam kegiatan perkenalan ini?</i>”</p>
Refleksi	<p><i>Di akhir sesi ini Fasilitator menjelaskan bahwa untuk mengenal lebih mendalam orang-orang di lingkungan kita, butuh kecermatan untuk mengenali ciri-ciri yang khas dari orang tersebut, mengetahui lebih dalam mengenai identitasnya, pengalamannya (dalam hal ini adalah pengalamannya terkait ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah). Fasilitator bisa juga mengulas sedikit tentang pengalaman mereka terkait dengan ekstrimisme dengan kekerasan, tetapi tidak perlu menjelaskan apa itu ekstrimisme dengan kekerasan. Fasilitator perlu menggunakan perspektif gender dalam menjelaskan ekstremisme kekerasan, sehingga</i></p>

	<p><i>para peserta memahami perbedaan yang dialami antara peserta laki-laki dan perempuan.</i></p> <p>Notulen: Mencatat hal-hal yang disampaikan oleh peserta tadi di kertas plano dengan tulisan besar-besar menggunakan huruf kapital</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesi III Menggambar Diri

Tujuan	Mengajak peserta untuk saling mengenal satu sama lain, melalui pengalaman mereka dengan ekstrimisme dengan kekerasan.
Metode	Menggambar Diri dan Curah Pendapat
Waktu	120 menit
Bahan dan Alat	Kertas Plano sejumlah peserta Spidol Artline sejumlah peserta Lakban kertas Dinding terbuka yang cukup luas
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator dibantu panitia membagikan kertas plano dan spidol kepada setiap peserta 2. Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan sesi ini dan apa saja yang akan dilakukan oleh peserta 3. Mintalah kepada setiap peserta untuk menggambar dirinya dengan besar di kertas plano yang sudah dibagikan 4. Sudah semua selesai, mintalah peserta untuk memberikan <i>tanda bintang</i> pada bagian luka (luka fisik maupun luka batin) yang pernah dialaminya, termasuk luka yang terkait dengan ekstrimisme dengan kekerasan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sesudah semua selesai, minta peserta menempel gambar mereka di dinding ruangan (bisa juga di luar ruangan) 6. Minta peserta untuk berkeliling menyaksikan gambar-gambar milik temannya 7. Minta kepada setiap peserta untuk menceritakan gambar dirinya masing-masing 8. Setiap satu peserta selesai menceritakan gambar dirinya yang dijelaskan menurut perspektif gender, fasilitator mempersilahkan peserta yang lain untuk bertanya, atau fasilitator mengajukan pertanyaan.
Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menanyakan kepada peserta, bagaimana perasaan mereka sesudah menceritakan pengalamannya 2. Fasilitator memperdalam (dengan mengajukan pertanyaan lebih detail) kasus-kasus kekerasan terkait dengan SARA, khususnya ekstrimisme dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dijelaskan melalui perspektif gender. 3. Fasilitator, dibantu notulis, mencatat informasi dari peserta di kertas plano, dan membaca kembali secara singkat rangkuman pengalaman peserta dengan menggunakan perspektif gender.

Sesi IV Kontrak Belajar

Tujuan	Peserta merumuskan kesepakatan mengenai hal-hal yang harus ditaati selama mengikuti pelatihan
Metode	Curah Pendapat
Waktu	75 menit

Bahan dan Alat	Kertas Plano sejumlah peserta Spidol Artline sejumlah peserta Lakban kertas Dinding terbuka yang cukup luas
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan sesi ini 2. Fasilitator, dibantu panitia, membagikan kertas metaplan kepada setiap peserta 3. Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk menuliskan hal-hal berikut di kertas metaplan yang sudah dibagikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa harapannya mengikuti pelatihan ini b. Apa kekhawatirannya selama mengikuti pelatihan ini c. Apa yang boleh dilakukan selama pelatihan ini d. Apa yang tidak boleh selama mengikuti pelatihan ini 4. Sesudah selesai menulis, mintalah setiap peserta menempelkan tulisannya ke kertas Plano yang ada di dinding 5. Fasilitator membacakan setiap tulisan dan mengkatagorikannya, serta membedakannya berdasarkan gender 6. Fasilitator mengklarifikasi kepada penulisnya, jika ada tulisan yang tidak jelas maksudnya 7. Fasilitator dengan dibantu panitia menayangkan Harapan Peserta; Kekhawatiran Peserta; Apa yang Boleh dan Apa yang Tidak Boleh dilakukan selama Pelatihan.

	8. Fasilitator menjelaskan apa saja dari Harapan dan Kekhawatiran Peserta yang tidak bisa dipenuhi oleh pelatihan ini
Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menegaskan bahwa apa yang dituliskan oleh peserta menjadi komitmen bersama yang harus ditaati selama pelatihan 2. Fasilitator meminta kepada dua orang peserta untuk menjadi “kordinator kelas” (satu laki-laki dan satu perempuan) yang bertugas memastikan terlaksananya komitmen bersama yang sudah dirumuskan berdasarkan perspektif gender.

BAGIAN II

MENGENAL KONSEP FUNDAMENTALISME, RADIKALISME, EKSTRIMISME DAN TERORISME

Sesi I Menggali Pemahaman Peserta Tentang Konsep Yang Terkait Dengan Ekstrimisme

Tujuan	Peserta dapat memahami dan menjelaskan pengertian ekstrimisme dengan kekerasan dalam kaitannya dengan konsep-konsep fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme
Metode	Curah pendapat dan diskusi kelompok
Waktu	180 menit
Bahan dan Alat	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas plano2. Kertas metaplan warna warni3. Spidol artline sejumlah peserta4. Lakban kertas5. Dinding ruangan yang cukup luas

	6. Ruang yang cukup luas untuk pergerakan peserta
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan secara singkat bahwa peserta adalah orang-orang yang pernah membaca atau mendengar kata teror, terorisme, fundamentalisme, ekstrimisme, dan radikalisme 2. Fasilitator, dengan bantuan panitia membagikan kertas metaplan dan spidol kepada setiap peserta 3. Mintalah setiap peserta untuk menuliskan pengertian mereka mengenai konsep-konsep fundamentalisme, radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Tidak boleh bekerja sama 4. Sesudah setiap peserta menuliskannya, fasilitator meminta empat orang peserta secara bergantian membacakan pengertian mereka tentang konsep-konsep tersebut di atas. 5. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok Kelompok 1: Kelompok Fundamentalisme Kelompok 2 : Kelompok Radikalisme Kelompok 3 : Kelompok Ekstrimisme Kelompok 4 : Kelompok Terorisme 6. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan pengertian mereka mengenai konsep yang sesuai dengan nama kelompok mereka 7. Sesudah diskusi selesai meminta mereka untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya, (beserta pendapat perseorangan yang sudah ditulis di kertas metaplan) di kertas plano dan tempelkan di dinding yang sudah disediakan 8. Minta kepada wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

	<p>Tanyakan, apakah ada anggota kelompok yang mau menambahkan atau melengkapi?</p> <p>9. Fasilitator membuka diskusi, tanya jawab untuk setiap presentasi kelompok</p> <p>10. Fasilitator dibantu notulis mencatat di kertas plano kesimpulan setiap presentasi kelompok dan kesimpulan seluruh proses diskusi</p>
Refleksi	<p>Berdasarkan catatan diskusi kelompok, Fasilitator membacakan pengertian peserta tentang konsep-konsep Fundamentalisme, Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme</p> <p>Fasilitator menjelaskan bahwa tidak semua Fundamentalisme, Radikalisme dan Ekstrimisme adalah buruk, hanya Fundamentalisme SARA, Radikalisme SARA dan Ekstrimisme SARA yang harus ditolak.</p> <p>Untuk lebih memperdalam pemahaman peserta tentang Fundamentalisme, Radikalisme, Ekstrimisme dan terorisme, Fasilitator meminta kepada semua peserta untuk membaca LEMBAR BACAAN yang tersedia.</p>

Lembar Bacaan

Memahami Konsep-konsep yang Terkait dengan Terorisme

Untuk memahami konsep ekstrimisme dengan kekerasan, mau tidak mau kita harus membacanya dalam konteks percakapan yang lebih luas, yakni tentang terorisme. Mengapa demikian? Karena ekstrimisme tidak bisa diperkirakan ancamannya jika dia dibaca terpisah dari konsep-konsep lain seperti fundamentalisme, radikalisme dan terorisme. Ekstrimisme dengan kekerasan sudah dengan sendirinya menggambarkan sebuah nilai, sikap atau

tindakan yang mengarah pada ancaman terhadap keselamatan orang lain. Karena ekstrimisme dengan kekerasan sudah mengandung di dalamnya pengertian sikap atau tindakan di luar batas nalar dan batas norma moral dan norma hukum. Tindakan seseorang yang memanjat gedung bertingkat tanpa peralatan sama sekali adalah tindakan yang ekstrim, tidak bisa diterima oleh nurani dan akal pikiran karena tingkat bahaya yang mengancamnya. Membayangkannya saja ngeri. Tapi tindakan ekstrim demikian ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar norma moral, maupun norma hukum—kecuali bahwa sang pemilik gedung tidak mau dirinya berurusan dengan aparat keamanan jika sang pemanjat jatuh dan meninggal. Memanjat gedung berlantai tanpa bantuan peralatan adalah tindakan ekstrim. Keyakinan bahwa cara ekstrim sebagai jalan terbaik, atau ekstrimisme tidak serta merta sesuatu yang mengancam keselamatan orang lain. Lebih dari itu, ekstrimisme dengan kekerasan sudah mengandaikan tindakan di luar nalar, di luar norma moral dan norma hukum, karena itu harus ditolak. Demikian juga berfikir dan bertindak radikal dalam kegiatan akademik dan ilmiah dianjurkan. Karena pemikiran dan tindakan radikal mendalam sampai ke akar-akarnya dalam ilmu dan teknologi justru akan menghasilkan temuan-temuan baru, terobosan dan kemajuan. Sikap dan tindakan radikal yang didasari oleh keyakinan ilmiah dan untuk kemajuan ilmu dan teknologi, sepatutnya dimusuhi. Sebaliknya, keyakinan, sikap dan tindakan radikal yang dilandasi oleh semangat diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu yang harus ditolak. Inilah radikalisme SARA yang membahayakan dan karenanya harus ditolak.

Seseorang memiliki keyakinan tertentu yang sangat mendalam, yang dipegang teguh tak tergoyahkan adalah seorang fundamentalis. Hal itu tidak masalah. Seorang yang cinta mati terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia adalah baik, sekalipun itu berarti dia seorang fundamentalis kebangsaan. Akan

tetapi, menjadi permasalahan jika fundamentalis—keyakinan mendasar tak tergoyahkan itu mengandung muatan sentimen SARA. Karena fundamentalisme SARA akan membawa seseorang pada keyakinan buta bahwa sukunya sendiri, agamanya sendiri, ras dan golongannya sendirilah yang paling benar, yang lain salah dan harus ditiadakan. Di dalam fundamentalisme SARA terkandung nilai penolakan terhadap yang lain. Ini bisa menimbulkan sikap diskriminasi dan ekstrimisme dengan kekerasan. Marilah melakukan pembahasan ini secara lebih mendalam melalui konsep-konsep berikut ini. Untuk memahaminya lebih lanjut, studi terorisme setidaknya menyediakan 4 konsep penting terkait terorisme, yaitu: (1) Terorisme (2) Fundamentalisme; (3) Radikalisme; (4) dan Ekstremisme;

Terorisme

Di dalam diskursus hukum internasional, terminologi Terorisme pertama kali digunakan pada forum internasional tahun 1973. Ketika itu, Liga Bangsa-Bangsa sedang mempersiapkan sebuah Konvensi yang dikenal sebagai Convention for Prevention and Punishment of Terrorism. Untuk menghindari multitafsir atas istilah Terorisme, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk seorang Pelapor Khusus yang diberi nama U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism berdasarkan mandat Resolusi 2005/80 dari Komisi HAM PBB. Mandat tersebut diberikan dalam rangka membuat suatu definisi universal atas istilah Terorisme. Dimana kemudian Pelapor Khusus mengusulkan definisi Terorisme sebagai, Perbuatan atau upaya percobaan dimana perbuatan tersebut pada pokoknya untuk menyatakan permusuhan yang bertujuan untuk menimbulkan kematian atau mengakibatkan luka yang serius terhadap satu atau sekelompok orang atau melibatkan kekerasan fisik yang serius atau mematikan terhadap

satu atau sekelompok orang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan keadaan atau situasi yang menimbulkan ketakutan yang teramat di dalam masyarakat.'

Sementara itu, untuk membatasi multitafsir terhadap istilah Terorisme, Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 memastikan bahwa istilah terorisme harus memenuhi tiga tahap karakteristik terorisme berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 1566 Tahun 2004, yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh serius, atau melakukan sandera
- b. Tindakan itu dilakukan untuk tujuan teror terhadap negara, mengintimidasi masyarakat umum, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Tindakan itu merupakan pelanggaran dalam lingkup dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Konvensi Internasional dan Protokol-Protokol yang berkaitan dengan terorisme. Demikian pula, setiap kriminalisasi pelaku yang mendukung serangan teroris harus dibatasi hanya untuk melakukan pelanggaran yang memiliki semua karakteristik di atas. Dalam setiap pembatasan tindakan teroris, penting bagi negara untuk memastikan bahwa formulasi dapat berlaku efektif, diformulasikan dengan presisi, dengan sendirinya berguna untuk melawan terorisme, bersifat non-diskriminatif dan tidak berlaku surut.

Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme pertama kali muncul sekitar tahun 1920 di Amerika. Konteks kemunculan istilah fundamentalisme pada waktu itu untuk menyebut Kelompok Kristen yang secara serius mengusahakan penerapan Bible secara murni, dan menolak teori evolusi temuan Darwin yang populer. Dalam pandangan

Dawam Raharjo, fundamentalisme pertama-tama muncul dalam situasi konflik antara budaya urban dan budaya pedesaan pada sejarah Amerika Serikat di masa-masa pasca Perang Dunia I. Pemimpin yang terkenal pada waktu itu adalah Tokoh Agraris; W.J. Bryan. Fundamentalisme muncul bersamaan dengan situasi depresi nilai-nilai agraris dalam proses industrialisasi dan urbanisasi di negeri tersebut. Fundamentalisme pada zaman itu merupakan gerakan perubahan reaktif atas pola peradaban yang diakibatkan proses industrialisasi dan urbanisasi masyarakat perkotaan.

Dalam studi filsafat, Fundamentalisme seringkali dipahami sebagai pemahaman yang literalis, atau tekstualis, dan ingin kembali pada sejarah masa lalu (yang imajiner). Sedang dalam sejarah Islam, bila dihubungkan dengan fakta historis sejarah peradaban Islam, gerakan fundamentalisme ini tidak sepenuhnya muncul sebagai reaksi atas modernisasi yang gagal. Melainkan karena dilatarbelakangi oleh urusan politik dan respon teologis tertentu. Dalam bidang teologi misalkan, fundamentalisme Islam dapat dijumpai pada sekte Khawarij. Sebuah kelompok politis-teologis yang mencuat atas reaksinya terhadap sikap Khalifah Ali Bin Abi Thalib dan Muawiyah dalam prosesi Tahkim. Dimana kelompok ini menuduh orang-orang yang terlibat dalam arbitrase (Tahkim) sebagai kafir.

Kelompok fundamentalis juga memiliki kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid dan literalis (yang juga dilakukan oleh kaum Fundamentalisme Protestan). Mereka memiliki asumsi bahwa Kitab Suci itu seperti nomenklatur (tata nama/tata susunan) yang mengatur secara rigid kehidupan manusia mulai dari hal-hal yang sepele (misal bagaimana cara makan yang baik, cara berpakaian yang baik, dll) sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks (misalkan bagaimana bentuk pemerintahan yang baik, bagaimana seharusnya seorang pemimpin, dll).

Di Timur Tengah, kelompok ini lebih suka menyebut dirinya dengan istilah lain seperti Al Ushuliyah Al Islamiyyah, atau Ba'ats Islam (Revivalisme Islam). Sedangkan bagi kelompok lain, mereka seringkali menyebutnya dengan cemooh kata-kata; Muta'asshibin (Kelompok Fanatis) atau Muthathohirin (Kelompok Radikal). Untuk mempermudah mengenali konsep Fundamentalisme, setidaknya ada 2 karakteristik yang melekat pada pemahaman ini, yaitu: (1) Literalis; dan (2) Revivalis. Literalis adalah cara kelompok fundamentalisme dalam memahami teks-teks di dalam Kitab Suci. Teks keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang a-historis, sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tanpa pijakan historis peradaban manusia. Atau dalam bahasa yang lain, teks keagamaan harus dipahami secara normatif.

Kelompok fundamentalis cenderung mengabaikan konteks sejarah dimana teks keagamaan itu dilahirkan. Bagi mereka latar belakang sosial-politik, atau latar belakang sejarah yang melandasi turunnya teks keagamaan tersebut tidaklah penting. Oleh karenanya, teks harus dipahami sebagai teks, tidak terikat pada ruang dan waktu yang melatarbelakanginya.

Revivalis adalah karakteristik yang kedua. Revivalis adalah karakteristik yang muncul akibat reaksi atas kegagalan modernisme, dan juga muncul sebagai akibat dari cara pandang literalis. Dalam bahasa yang sederhana, revivalis adalah pekikan kuat untuk kembali pada ajaran agama yang mendasar. Ajaran agama mendasar yang dimaksud adalah kembali kepada sumber hukum utama di dalam agama tersebut, ditambah lagi dengan imajinasi tentang sejarah masa lalu ketika Nabi masih hidup.

Mereka selalu membayangkan (yang tentu saja imajiner) bahwa zaman keemasan Agama adalah zaman di mana Nabi masih hidup, dan oposisi dari tesis itu tentu saja menyebut zaman dimana kita hidup sekarang ini adalah zaman kegelapan. Asumsi tersebut lah yang ada di dalam pemahaman kelompok revivalis ini. Solusi yang

mereka tawarkan sudah bisa ditebak: “Jika ingin selamat, kita harus kembali ke sumber hukum utama dalam Agama, dan kembali ke kehidupan seperti di Zaman Nabi.”

Dalam teori yang lain, Jeffrey Haynes menyebut bahwa kelompok fundamentalis memiliki karakter sikap dan pemikiran sebagai berikut:

1. Adanya hasrat untuk kembali kepada tradisi agama yang mendasar dan sikap melucuti segala penambahan pada tradisi agama tersebut (semangat purifikasi/pemurnian)
2. Penolakan agresif terhadap modernitas Barat yang dianggap secular.
3. Identitas grup minoritas yang berposisi, eksklusif, dan berwatak militan.
4. Relasi hierarkis dan patriarkis antar sel anggota.
5. Kekhawatiran atas serangan pengaruh negatif sekularisme pada orientasi kepercayaan kaum fundamentalis sebagai preferensi ‘way of life’-nya.
6. Bertujuan untuk menciptakan sistem sosial yang berbasis tradisionalisme, dan menjauh dari modernitas.
7. Mengampanyekan capaian target yang harus sesuai dengan prinsip ajaran agama untuk mengubah supremasi hukum, moralitas, norma sosial, dan dalam beberapa kasus juga terkait dengan perubahan konfigurasi domestic dan internasional.
8. Memiliki kecenderungan berlawanan vis a vis dengan komunitas keagamaan lain yang dianggap kurang memegang kewajiban agamanya secara fundamental. Dalam kadar tertentu, memusuhi sistem keyakinan lain yang dianggapnya sesat.

Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *radix*, yang berarti akar. Radikal secara etimologi berarti berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dalam Cambridge Advance Learners Dictionary, Radikal didefinisikan sebagai sikap percaya atau ekspresi keyakinan yang menyatakan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik secara masif dan secara ekstrem. Istilah ini adalah murni produk Barat yang sering dihubungkan dengan Fundamentalisme dalam Islam.

Dalam tradisi Barat, istilah fundamentalisme dalam Islam seringkali ditukar dengan istilah lain, seperti 'Ekstremisme Islam' sebagaimana dilakukan oleh Gilles Kepel, atau 'Islam Radikal' menurut Emmanuel Sivan, dan ada juga istilah 'Integrisme', 'Revivalisme', atau 'Islamisme'. Istilah-istilah itu digunakan untuk menunjukkan gejala 'kebangkitan Islam' yang diikuti oleh militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrem. Dalam studi Islam, istilah 'Islam Radikal' seringkali disamakan dengan 'Islam Fundamentalis'. Sebab istilah fundamentalisme lebih banyak mengekspos liberalism dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit, yang sering melahirkan aksi destruktif, dan anarkis. Betapa Pun demikian, senyatanya Radikalisme tidaklah sama dengan Fundamentalisme. Ini adalah dua terminology yang berbeda. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri yang beberapa mungkin bisa sama, tetapi beberapa karakter lainnya bisa sangat berbeda.

Pastinya, radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam studi terorisme, Radikalisme disebut sebagai embrio lahirnya terorisme. Dimana radikalisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai

yang ada secara drastic lewat aksi kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim.

Setidaknya ada beberapa ciri yang dapat dikenali dari Radikalisme, yaitu: (1) Intoleran; (2) Fanatik; (3) Eksklusif; (4) Revolusioner. Intoleran adalah sikap dimana seseorang tidak lagi menghargai sistem keyakinan orang lain. Biasanya sikap ini muncul dari cara pandang yang sempit dalam beragama. Fanatik adalah sikap dimana seseorang selalu merasa benar sendiri, dan menganggap orang lain salah. Sikap fanatik ini lah yang seringkali menyebabkan kelompok Radikal dengan mudah mengkafirkan orang lain.

Pada kadar tertentu, mereka dapat menghalalkan darah orang lain yang dianggapnya sesat. Sementara itu sikap eksklusif berarti membedakan dirinya dari masyarakat pada umumnya. Mereka merasa berbeda dengan kebanyakan orang, dimana sikap ini membawa mereka pada kehidupan beragama yang tertutup dan tidak membuka ruang dialog pada pemikiran lain. Revolusioner cenderung mengarah pada hasrat politik untuk mengubah tata masyarakat/tata pemerintahan secara total. Bagi kelompok mereka, masyarakat/negara di zaman modern adalah masyarakat/negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianutnya. Berpijak pada asumsi itu, mereka memiliki hasrat yang besar untuk mengubahnya, dan tentu untuk mengubahnya mereka akan menggunakan segala cara. Bahkan dengan cara- cara kekerasan sekali pun.

Ekstremisme

Sejatinya, Ekstremisme adalah tahapan ke-3 di dalam spektrum ekspresi keagamaan. Ekstremisme memberi penekanan terhadap jalan kekerasan sebagai metode utama dan bahkan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik. Ekstremisme sudah pasti bersifat revolusioner. Oleh karena metode

dan cara yang ditempuh oleh kelompok ekstremis adalah dengan merobohkan dan menjebol sistem lama, baru kemudian mereka akan membangun sebuah sistem yang sama sekali baru di atas reruntuhan itu. Perubahan itu diharapkan terjadi secara cepat dan seketika, serta melalui jalan kekerasan. Berbeda dengan Radikalisme, ekstrimisme memperlihatkan ketidaksabaranmu menunggu perubahan dengan memilih penggunaan cara-cara kekerasan.

Ekstremisme adalah tahap terakhir menuju terorisme. Sejangkal saja seorang ekstremis menemukan momentumnya, ia seketika dapat berubah menjadi seorang teroris. Perbedaannya hanya di soal tujuan. Ekstrimisme dan Terorisme sama-sama menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengubah suatu tatanan negara/masyarakat. Bedanya, cara kekerasan yang digunakan oleh Terorisme biasanya disertai dengan penebaran ketakutan di tengah masyarakat. Jika tidak dicegah sejak dini, ekstrimisme bisa berkembang menjadi terorisme.

Sesi II Memahami Peran Perempuan Di Tengah Isu Ekstremisme

Dalam Sesi ini, Pemateri lebih diutamakan yang memiliki perspektif gender dan memahami konsep-konsep mengenai Gender Equality, terutama yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme;

Tujuan	Peserta lebih mengerti dan lebih paham apa itu Gender Equality, dan Peran Perempuan dalam kaitannya dengan Fundamentalisme dan Radikalisme SARA serta Terorisme, maupun sebagai agen aktif dalam resolusi konflik dan mediasi damai.
Metode	Ceramah, Testimoni, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok
Waktu	180 menit

Bahan dan Alat	Kertas Plano Kertas metaplan sejumlah peserta Ballpoint sejumlah peserta Lakban kertas
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator berperan sebagai moderator, atau panitia menyediakan moderator tersendiri 2. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini akan meliputi ceramah, testimoni, tanya jawab dan diskusi kelompok dan pada saat ceramah/testimoni berlangsung setiap peserta wajib menuliskan dua pertanyaan di kertas metaplan yang sudah diberikan kepada peserta 3. Fasilitator mempersilahkan Narasumber menyampaikan pokok-pokok pikirannya 4. Sesudah ceramah selesai, fasilitator mempersilahkan nasumber kedua untuk menyampaikan kesaksiannya (fasilitator mengarahkan agar kesaksiannya dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sekolah-sekolah). 5. Sesudah ceramah dan testimoni selesai, fasilitator membuka forum tanya jawab 6. Setelah sesi ceramah, testimoni dan tanya jawab selesai, fasilitator, dibantu panitia, mempersilahkan narsumber untuk meninggalkan ruangan. Peserta diminta untuk tetap tinggal di ruangan 7. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk membagi diri ke dalam TIGA kelompok 8. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia

	<p>9. Mintalah semua kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya di kertas plano yang sudah disediakan</p> <p>10. Fasilitator meminta kepada wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya</p> <p>11. Fasilitator membuka tanya jawab setiap presentasi kelompok selesai</p>
Refleksi	<p>Fasilitator menjelaskan mengenai pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach) yang berpusat pada aspek pencegahan (prevention focused), bersifat konteks spesifik dan menggunakan pendekatan multi-stakeholder yang dipimpin oleh komunitas dan berpusat pada masyarakat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan pentingnya Gender Equality, dan Peran Perempuan di dalam Pencegahan Radikalisme, ekstrimisme dan kaitan potensialnya dengan terorisme.</p> <p>Fasilitator memberikan penekanan-penekanan mengenai adanya kasus-kasus ekstrimisme yang melibatkan perempuan sebagai korban di lingkungan sekolah dan meminta peserta selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ekstrimisme yang melibatkan perempuan di lingkungan sekolah. Fasilitator memberikan penekanan mengenai pentingnya meningkatkan peran aktif perempuan dalam membangun dialog, konflik resolusi dan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka.</p>

Lembar Bacaan

Isu Perempuan di dalam pencegahan dan penanganan Ekstremisme merupakan hal patut diperbincangkan. Riset UN Women atau Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (2020) di tiga negara (Bangladesh, Indonesia, dan Filipina) menemukan adanya korelasi antara sikap misogini dengan kecenderungan untuk mendukung ekstremisme kekerasan¹. Tidak cukup hanya diperbincangkan, bahkan juga dipertimbangkan dalam setiap kebijakannya. Setidaknya, terdapat 3 alasan mengapa isu perempuan menjadi patut untuk dipertimbangkan dalam isu pencegahan ekstremisme.

Pertama, kaum perempuan merupakan pihak yang dijadikan sebagai korban ekstremisme yang tidak menyediakan tempat bagi opini perempuan atau pengakuan akan kehendak bebas mereka. Dalam arti, kepatuhan perempuan potensial digunakan sebagai dasar untuk menekan mereka terlibat dalam radikalisme, baik kekerasan atau non-kekerasan. Di sisi lain, teks-teks keagamaan yang bernuansa patriarki yang mendomestikasi perempuan, dipahami secara sempit sebagai larangan perempuan untuk berkontribusi pada bidang sosial. Asumsi atas kelemahan fisik, mental dan spiritual perempuan telah menjadikan mereka sebagai subjek kepatuhan pada suami, kekurangan kekuatan dan kontrol diri (self-control) dan kultur patriarkal telah merepresentasikan perempuan ideal sebagai istri yang sempurna yang diam dan patuh

¹ UN Women. 2020 (April). Building a Stronger Evidence Base: The Impact of Gender Identities, Norms, and Relations on Violent Extremism. Diakses dari <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/building-a-stronger-evidence-base-the-impact-of-gender-identities-norms>

sepenuh hati terhadap suami tanpa kritik untuk menghasilkan keluarga yang harmonis.

Kedua, perempuan mempunyai peran yang kompleks dalam melibatkan diri dalam mendukung dan mendorong kekerasan religius. Penelitian van de Linde dan van der Duin menyatakan pentingnya peran perempuan dalam kekerasan ekstremis. Rasionalisasinya adalah perempuan potensial terlibat dalam radikalisme teroris, dan pelibatan mereka dalam aksi terorisme cenderung diabaikan. Dalam hal partisipasi perempuan yang terlibat dengan aksi ekstremisme, ada peningkatan keterlibatan secara langsung, seperti menjadi pelaku bom bunuh diri (suicide bombers). Selain itu, eliminasi marginalisasi dan stereotip juga berbanding lurus dengan deradikalisasi, sebagai misal adalah menekankan peran maternal perempuan dalam pembentukan narasi-narasi kontra-terorisme.²

Ketiga, domestikasi dan eksklusi perempuan dalam kehidupan publik dan produksi teks keagamaan membuat mereka dapat menjadi aktif menerima bahan pengajaran yang bisa saja dieksploitasi untuk mendukung terorisme. Radikalisme terhadap perempuan sebagai korban dan pelaku tidak hanya berasal dari praktik radikal, tetapi juga dapat berasal dari teks-teks keagamaan yang subordinatif-diskriminatif perempuan. Prinsip eksklusivitas laki-laki (male-centric) dalam produksi dan interpretasi teks-teks keagamaan pada akhirnya dapat membuat perempuan hanya menjadi objek kontrol dari pengetahuan religius serta peran mereka dalam memproduksi narasi yang ekual gender menjadi terabaikan.

² van de Linde dan van der Duin, "The Delphi Method as Early Warning", 1558

Peran Perempuan Dalam Pencegahan Ekstremisme Dan Radikalisme

Keadilan Gender adalah dimensi transenden di dalam kehidupan manusia. Keadilan Gender tidak dapat dilihat hanya sebatas simbol-simbol semata, tetapi juga harus diyakini sebagai suatu keyakinan yang mendasari setiap lini kehidupan manusia. Pencegahan kekerasan ekstremisme dan intervensi kontra-terorisme cenderung untuk mengabaikan perspektif gender dan peran berbasis perempuan, padahal perempuan seringkali menjadi korban pertama dari kelompok ekstremis. Perempuan juga terkena dampak kebijakan kontra-terorisme, yang dapat membatasi hak-hak mereka dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Semakin banyak juga kasus di mana perempuan direkrut, secara paksa atau sukarela, ke kelompok-kelompok ini dan juga memainkan peran dalam merekrut laki-laki dan perempuan lain. Untuk itu, hari-hari ini keterlibatan perempuan dalam deradikalisasi diinisiasi oleh pemerintah, lembaga internasional dan NGO/LSM yang bertujuan untuk mendukung peran perempuan dalam mencegah kekerasan ekstremis, termasuk dengan kerjasama dengan organisasi perempuan akar rumput (*local grassroots women's organisations*). Sehingga pada saat ini, peran perempuan sebagaimana pembentuk kebijakan, edukator, anggota komunitas dan aktivis dalam kontra kekerasan ekstremisme mulai diakui.³

Urgensi pelibatan perempuan dalam deradikalisasi melalui pendidikan adalah merupakan fakta bahwa radikalisme dimulai dari ide radikal melalui pendidikan sebagai elemen utama dan dasar pembentuk ide-ide radikalisme. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) melalui Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000. INPRES No 9 Tahun 2000 yang menginstruksikan

³ Carter, *Women and Violent Extremism*, 3.

kepada seluruh kementerian, Lembaga pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia , Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Oleh Karena radikalisasi dapat berbentuk non-kekerasan sehingga pendekatan non-kekerasan di mana mainstream masyarakat masih mengidentikkan kelembutan dan feminitas lebih dimiliki oleh perempuan, akan lebih sesuai dan efektif dalam upaya deradikalisasi. Hal itu pula yang menjadi alasan penggunaan pendekatan sosial dan psikologis dalam pelibatan perempuan pada program deradikalisasi ditinjau dari aspek gender, khususnya di Indonesia.

Peran perempuan dalam gerakan fundamentalisme dapat dipetakan menjadi tiga bentuk. Pertama, sebagai pengikut dan pendamping setia suami. Peran perempuan sebagian besar masih pada tahap domestifikasi perempuan. Artinya, mereka bukanlah aktor utama melainkan hanya sebagai istri, pengikut setia, dan ibu dari calon-calon teroris. Kedua, peran selaku ahli propaganda dan agen perekrutan. Sejumlah perempuan dalam gerakan terorisme, seperti ISIS tidak diperbolehkan ikut bertempur di lapangan, melainkan diberikan peran khusus di media sosial sebagai ahli propaganda, pendakwah, dan perekrut dengan menerapkan cara-cara rekrutmen yang mengandalkan hubungan pertemanan dan kekerabatan. Ketiga, peran perempuan sebagai fighter atau bomber. Kelompok terorisme juga memanfaatkan perempuan terpelajar di negara-negara Barat, khususnya kulit putih sebagai pelaku bom bunuh diri. Pelibatan mereka penting untuk menghapus stereotip Barat tentang negara-negara Muslim sebagai sumber teroris.

Di sisi lain, Aktivistis perempuan Muslim Indonesia dan advokasi hak-hak perempuan telah secara efektif termasuk dalam strategi pembacaan kembali al-Qur'ân dan reinterpretasi sumber-sumber utama hukum Islam untuk mempertahankan ide-ide ekualitas gender dan keadilan. Menguntungkan dari segi jaringan internasional dan pertukaran pengetahuan (knowledge exchange), feminis Indonesia telah menyebarkan dan mempromosikan ide oleh figur-figur mapan seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Ziba Mir-Hosseini, Mai Yamani, Shamima Shaikh. Banyak dari mereka juga mengarahkan pandangannya pada interpretasi fundamental dan liberal serta implikasinya dalam Hukum Islam, yang dipersepsikan sebagai produk hegemoni patriarkal. Secara khusus, Indonesia mempunyai banyak stok intelektual Muslim, termasuk dari kalangan perempuan, sebagai sebuah hasil edukasi ekspansif rezim Orde Baru (1966-1998). Kathryn Robinson menyatakan dalam penelitiannya mengenai politik gender di Indonesia bahwa banyak cendekiawan yang memprotes interpretasi bias gender dari interpretasi sumber-sumber hukum Islam dan berargumen urgennya rekonstruksi nilai-nilai Islam dan eradikasi tradisi patriarki yang telah mengakar dalam pemikiran dan praktis masyarakat Muslim.

Karen Jacques and Paul J. Taylor mengonfirmasi bahwa keterlibatan perempuan dalam radikalisme maupun deradikalisasi terkait erat dengan pencapaian pendidikan secara individual. Karena pendidikan merupakan proses transformasi intelektual dan pengetahuan, termasuk pembentukan karakter anak yang tidak hanya terbatas pada bentuk formal tetapi juga informal dalam lingkup keluarga. Sehingga peran deradikalisasi oleh perempuan menjangkau spektrum yang luas dari proses radikalisme. Di sisi lain, radikalisme juga meniscayakan proses transformasi dan transfer paham radikal untuk menjadikan orang biasa menjadi ekstremis dengan memenuhinya dengan pengetahuan ekstremis. Eradikasi

ide-ide radikal melalui pengajaran yang moderat dan toleran sangat urgen dilaksanakan. Dalam konteks ini, deteksi dini radikalisme dengan melibatkan perempuan dapat berjalan secara efektif. Hal ini didasari fakta bahwa perempuan memainkan peran vital dalam keluarga, secara partikular dalam pembentukan karakter anak-anak.

Di Liberia, perempuan mempunyai peran yang sangat bernilai dalam proses perdamaian. Contohnya adalah usaha dari Gerakan Perdamaian Liberia (The Liberian Peace Movement) yang dipimpin oleh Leymah Gbowee yang memimpin aksi memobilisasi ribuan perempuan untuk memprotes perang sipil Liberia dengan menjalankan aksi diam dan menolak hubungan seks dengan suami. Gerakan ini telah berkontribusi dalam mengakhiri perang sipil pada tahun 2003. Sedangkan di Nigeria, sebagian besar pelaku radikal di Nigeria merupakan pengikut atau simpatisan yang dimotivasi secara primer oleh kerasnya kompetisi ekonomi. Banyak dari pelaku teroris tidak mendapatkan pendidikan formal dan kesempatan kerja. Dalam kasus yang demikian, eliminasi radikalisme harus bermula dari deradikalisasi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kasus Indonesia, deradikalisasi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik kultur dan kondisi sosio-politik lokal. Radikalisme di Indonesia merupakan fenomena yang aneh, walaupun tetap dimungkinkan, karena sedikitnya kondisi deprivatif yang dapat memunculkan radikalisme. Kebijakan imperatif untuk membentuk ulama dan mengubah pola pikir perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kontra terorisme. Pelibatan perempuan dalam deradikalisasi berhubungan erat dengan posisi perempuan merupakan guru alami bagi keluarga dan anak-anak, yang harus memainkan peran vital dalam mempengaruhi kebijakan keluarga. Karena pendidikan merupakan proses transformasi intelektual dan pengetahuan, termasuk pembentukan karakter anak yang tidak hanya terbatas pada bentuk formal tetapi juga informal dalam

lingkup keluarga. Pelibatan perempuan sangat penting karena mereka mempunyai kemampuan prevensi dalam tahap deteksi dini radikalisme. Sehingga pengambil kebijakan harus terus memanfaatkan peran vital dan ekstensif yang dapat dimainkan perempuan yang mampu menjangkau spektrum yang luas dari proses radikalisasi.

Sesi III Mengenal Konsep Dan Ciri-Ciri Ekstrimisme Dengan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah

Pada sesi ini, narasumber sebaiknya dari unsur Diknas Provinsi dan testimoni oleh mantan pelaku ekstrimisme dengan kekerasan yang telah bertobat.

Tujuan	Peserta lebih mengerti dan lebih paham apa itu ekstrimisme dengan kekerasan di sekolah dan kaitannya dengan Fundamentalisme dan Radikalisme SARA serta Terorisme
Metode	Ceramah, Testimoni, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok
Waktu	180 menit
Bahan dan Alat	Kertas Plano Kertas metaplan sejumlah peserta Ballpoint sejumlah peserta Lakban kertas
Aktivitas	12. Fasilitator berperan sebagai moderator, atau panitia menyediakan moderator tersendiri 13. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini akan meliputi ceramah, testimoni, tanya jawab dan diskusi kelompok dan pada saat ceramah/testimoni berlangsung setiap peserta wajib menuliskan dua pertanyaan di kertas metaplan yang sudah diberikan kepada peserta

	<p>14. Fasilitator mempersilahkan Narasumber menyampaikan pokok-pokok pikirannya</p> <p>15. Sesudah ceramah selesai, fasilitator mempersilahkan nasumber kedua untuk menyampaikan kesaksiannya (fasilitator mengarahkan agar kesaksiannya dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sekolah-sekolah).</p> <p>16. Sesudah ceramah dan testimoni selesai, fasilitator membuka forum tanya jawab</p> <p>17. Setelah sesi ceramah, testimoni dan tanya jawab selesai, fasilitator, dibantu panitia, mempersilahkan narasumber untuk meninggalkan ruangan. Peserta diminta untuk tetap tinggal di ruangan</p> <p>18. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk membagi diri ke dalam TIGA kelompok</p> <p>19. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia</p> <p>20. Mintalah semua kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya di kertas plano yang sudah disediakan</p> <p>21. Fasilitator meminta kepada wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya</p> <p>22. Fasilitator membuka tanya jawab setiap presentasi kelompok selesai</p>
Refleksi	Fasilitator menjelaskan ciri-ciri penting dari fundamentalisme, Radikalisme, ekstrimisme dan kaitan potensialnya dengan terorisme

	<p>Fasilitator memberikan penekanan-penekanan mengenai adanya gejala-ekstrimisme di lingkungan sekolah dan meminta peserta selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ekstrimisme di lingkungan sekolah</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUGAS/PERTANYAAN PEMANDU DISKUSI KELOMPOK

Kelompok 1

1. KELOMPOK BUATLAH RINGKASAN ISI CERAMAH DAN TESTIMONI YANG BARU SAJA DIKUTI PESERTA

2. APA SAJA CIRI-CIRI PELAKU EKSTRIMISME SARA, FUNDAMENTALISME SARA DAN RADIKALISME SARA? JELASKANLAH SATU PERSATU

Kelompok 2

1. SEJALAN DENGAN MATERI CERAMAH DAN TESTIMONI YANG BARU SAJA DIKUTI PESERTA, APAKAH DI SEKOLAH-SEKOLAH DAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH PESERTA TERDAPAT GEJALA-GEJALA MUNCUL DAN BERKEMBANGNYA EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN, FUNDAMENTALISME SARA DAN RADIKALISME SARA? TUNJUKKAN BUKTI-BUKTINYA

3. BAGAIMANAKAH CIRI-CIRI PELAKUNYA DAN TANDA-TANDA ORANG YANG POTENSIAL MELAKUKAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN?

TABEL UNTUK KELOMPOK 2

KATEGORI GEJALA	CIRI-CIRI	AKTOR DAN JUMLAH INDIKATIF
FUNDAMENTALI SME SARA		
RADIKALISME SARA		
EKSTRIMISME SARA		
EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN		

Kelompok 3

1. APA SAJA CARA-CARA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK EKSTRIMIS/FUNDAMENTALIS/RADIKAL UNTUK MEREKRUT ANGGOTA DARI LINGKUNGAN SEKOLAH?
2. APAKAH PENERAPAN CARA-CARA TERSEBUT ADA JUGA DI LINGKUNGAN SEKOLAH ANDA? JELASKAN DENGAN BUKTI-BUKTI

BAGIAN III

MENINGKATKAN PENGETAHUAN

MEDIA SOSIAL TERKAIT

EKSTREMISME DI SEKOLAH

Sesi I Distorsi Komunikasi

Komunikasi yang terjadi melalui media sosial seringkali diisi berita atau informasi bohong dan menyesatkan. Entah itu disengaja oleh pembuatnya maupun karena kealpaan penyebarannya. Jika terkait dengan penyebaran setimen ekstrimisme dengan kekerasan, hal itu bisa berbahaya karena bisa membentuk karakter pembaca yang mengidap sentimen SARA.

Tujuan	Pada sesi ini peserta diajak untuk memahami bahaya distorsi komunikasi
Metode	Simulasi dan diskusi kelompok
Waktu	90 menit
Bahan dan Alat	Kertas Tulisan berisi pesan yang akan disampaikan secara berantai
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi peserta menjadi dua kelompok2. Fasilitator meminta peserta untuk duduk berjajar ke samping atau ke belakang

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk kelompok kedua, peserta yang posisinya di tengah diminta untuk keluar sebentar untuk menemui panitia, sesudah diberi tugas yang bersangkutan diminta duduk kembali ke tempatnya semula 4. Kepada peserta yang paling ujung, fasilitator membacakan pesan dengan berbisik, supaya peserta yang disebelahnya tidak mendengar 5. Sesudah pesan disampaikan, peserta pertama menyampaikan pesan itu kepada peserta disebelahnya atau di belakangnya (tergantung urutan peserta ke samping atau ke belakang). Peserta kedua melanjutkan pesan itu ke peserta ketiga, dan seterusnya sampai ke peserta di urutan terakhir 6. Sesudah penyampaian pesan selesai, fasilitator menanyakan kepada peserta penerima pesan terakhir/peserta yang duduk paling ujung/paling depan, apa isi pesan yang diterima. Mintalah agar bicaranya keras-keras
Refleksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang terjadi dengan proses komunikasi yang dijalani peserta? Adakah penyimpangan informasi? Mengapa? ▪ Fasilitator menjelaskan bahwa semakin panjang rantai komunikasi, maka semakin tinggi potensi terjadinya misinformasi, apalagi jika ada orang-orang tertentu yang secara sengaja membelokkan informasi itu untuk kepentingan tertentu.

Pesan yang harus disampaikan oleh Fasilitator kepada peserta
“kematian karena covid-19 sangat tinggi. Tetangga tiga atau lima rumah dari rumah saya katanya kehilangan dua atau tiga keluarganya, ngeri..”

Pesan dari panitia kepada peserta (dari kelompok 2) yang duduk di tengah

ABAIKAN PESAN SEBELUMNYA, TUGAS ANDA ADALAH MENYAMPAIKAN PESAN INI.

“kematian karena covid-19 sangat tinggi. Tetangga kita yang paling ujung itu usahanya bangkrut, hati-hati jangan mau dihutangi”..bahaya.

Sesi II Mencegah Pengaruh Berita Hoax Dan Provokatif

Media Sosial seringkali dipergunakan sebagai media untuk menyebarkan kebohongan, provokasi, sampai ungkapan kebencian, baik karena disengaja maupun tidak. Terkait ekstrimisme dengan kekerasan, civitas akademika sekolah tak luput jadi sasaran.

Tujuan	Peserta dapat mengidentifikasi dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi pengaruh berita-berita hoax, ungkapan kebencian dan berita provokatif di lingkungan sekolah
Metode	Diskusi
Waktu	60 menit
Bahan dan Alat	Kertas metaplan dan spidol
Aktivitas	1. Fasilitator menjelaskan bahwa tadi di dalam sesi sebelumnya peserta sudah mengalami bagaimana dalam permainan, terjadi kasus berita distorsi informasi, baik yang terjadi tanpa sengaja, maupun karena kesengajaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi dengan mereview pengalaman mereka masing-masing terkait dengan berita hoax dan berita-berita provokatif yang pernah mereka terima atau alami 3. Fasilitator meminta peserta untuk membuat daftar berita-berita hoax tersebut di kertas metaplan yang sudah disiapkan dengan spidol 4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menempelkan daftar berita hoax dan atau provokatif ke kertas plano yang sudah disediakan 5. Fasilitator meminta kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi alternatif solusi agar pengaruh buruk berita hoax dan provokatif itu menyebar di lingkungan sekolah 6. Fasilitator meminta kepada wakil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 7. Fasilitator membuka forum tanya jawab/diskusi
Refleksi	Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah hasil rumusan untuk mencegah pengaruh berita-berita hoax dan provokatif itu bisa diberlakukan di kelas mereka atau di sekolah mereka masing-masing?

BAGIAN IV

MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DINI EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH

Sesi I Membuat Soal

Mencegah ekstrimisme di lingkungan sekolah salah satunya bisa disisipkan melalui soal ujian atau melalui kuis.

Tujuan	Peserta diharapkan mampu membuat soal essay dan soal pilihan ganda yang menuntun siswa untuk menghargai toleransi dan kebhinekaan
Metode	Kerja individual dan diskusi kelompok
Waktu	90 menit
Bahan dan Alat	Kertas Plano Kertas metaplan dua kali jumlah peserta Ballpoint sejumlah peserta Spidol Artline dua kali jumlah kelompok
Aktivitas	1. Fasilitator menjelaskan bahwa sesudah mengikuti kegiatan sampai bagian ketiga, tentu peserta

	<p>sudah lebih mengetahui dan memahami apa itu ekstrimisme dengan kekerasan, fundamentalisme SARA, radikalisme SARA serta bahaya-bahayanya. Fasilitator juga mengingatkan bahwa pada saat sesi ceramah (Bagian II, Sesi 2) peserta sudah pernah membuat pertanyaan. Manfaatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk membuat membagi diri dalam dua kelompok 3. Setiap anggota kelompok satu membuat tiga soal pilihan ganda dan setiap anggota kelompok dua membuat tiga soal essay 4. Jelaskan bahwa soal-soal tersebut harus menggambarkan upaya melawan ekstrimisme dengan kekerasan, Radikalisme SARA, Fundamentalisme SARA dan terorisme 5. Setelah semua selesai membuat soal, fasilitator meminta setiap orang untuk menempelkan soal yang dibuat di kertas metaplan ke kertas Plano 6. Fasilitator meminta salah seorang peserta untuk memandu jalannya diskusi kelompok. 7. Diskusi kelompok selesai jika semua soal sudah dianggap baik dan disepakati
Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menanyakan bagaimana perasaan peserta setelah berhasil membuat soal, dikoreksi dan soal-soal tersebut disepakati bersama-sama 2. Fasilitator menjelaskan bahwa dengan membuat soal, selain kita mendalami pengertian kita tentang konsep-konsep ekstrimisme, radikalisme dan fundamentalisme, kita juga ikut membantu

	<p>mencegah penyusupan aksi ekstrimisme, radikalisme dan fundamentalisme SARA di kalangan siswa</p> <p>3. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan kemungkinan soal-soal yang sudah mereka buat bisa diterapkan dan diembangkan di kelas mereka masing-masing</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesi II Pendampingan Kasus

Tujuan	Peserta dapat merumuskan sistem bimbingan dan penyuluhan yang dapat mencegah penyebaran fundamentalisme, radikalisme, dan ekstrimisme SARA di lingkungan sekolah
Metode	Studi Kasus
Waktu	90 menit
Bahan dan Alat	<p>Kertas metaplan bertuliskan tanda-tanda Ekstrimisme dst</p> <p>Lakban Kertas</p> <p>Kertas Plano</p> <p>Spidol Artline</p>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok. 2. Fasilitator menjelaskan bahwa kelompok adalah kelompok guru yang menghadapi kasus seorang siswa yang menjadi pengikut gerakan ekstrimisme/radikalisme SARA. 3. Mintalah setiap anggota kelompok untuk membaca lembar kasus yang telah disediakan 4. Mintalah para guru menjalankan peran sebagai pendamping/BP menghadapi murid yang sikap dan tindakannya memenuhi kriteria Radikal SARA/Ekstrimisme dengan Kekerasan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Setiap Kelompok diminta untuk merumuskan saran-saran apa yang harus diberikan agar siswa yang sedang mengalami kasus ini bisa keluar dari masalahnya 6. Fasilitator meminta hasil diskusi itu ditulis di kertas plano dan ditempelkan di dinding 7. Setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya
Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta, apakah kasus ini ditemukan juga oleh peserta di lingkungan sekolah mereka atau di sekolah yang ada di kota/kabupaten ini? 2. Apakah saran-saran yang sudah berhasil dirumuskan oleh setiap kelompok bisa dilaksanakan oleh peserta di masing-masing sekolahnya?

Lembar Kasus

Jéilah adalah seorang siswa kelas 2 SLTA yang ramah dan suka bergaul. Satu saat ia berubah sikap menjadi tertutup, tidak suka bergaul, cara berpakaianya berubah dan selalu menolak jika diajak kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Setiap kali pulang sekolah ia mampir ke salah satu tempat bimbingan belajar di dekat sekolahnya. Katanya di tempat itu dia mendapat tambahan pelajaran bahasa Inggris, Kimia, Fisika dan pelajaran lain dari mentor-mentornya. Sebagian dari mentor itu adalah alumni sekolahnya. Mereka umumnya ramah dan pandai-pandai. Kurang lebih tiga bulan mengikuti bimbingan belajar, maka pelajaran yang harus diikuti bertambah, yaitu pelajaran agama dan pelajaran lain, seperti teknik-teknik mendekati teman, melobi guru, merebut

posisi di kepengurusan Osis, serta pelajaran menjadi pemimpin. Pelajaran yang diperoleh terus meningkat saja, ditambah dengan pelajaran mengenai kewajiban dan tata cara menegakkan ajaran agama di lingkungan terdekatnya, sampai menjadikan ajaran agama sebagai pedoman umum, termasuk di sekolahnya. Dalam proses pembelajaran di tempat itu, Jéilah dan teman-temannya masing-masing didampingi tiga orang mentor yang setiap saat mengawasi tindak-tanduknya. Sampai satu saat ia diajak untuk berkumpul di satu tempat, dan malamnya Jeilah dengan teman-temannya diminta untuk bersumpah setia untuk taat mutlak kepada para mentor dan bersetia untuk menegakkan ajaran agamanya di tempat-tempat umum, menolak para penganut dan penganjur aturan-aturan serta keyakinan-keyakinan lain yang berbeda dengan ajarannya. Sampai pada akhirnya ia dia diwajibkan menolak ideologi negaranya, serta lagu-lagu kebangsaan negaranya.

Mula-mula jika pulang dari tempat bimbingan belajarnya ia langsung naik angkot, tetapi belakangan para mentor mengharuskan ia naik angkot tidak dari depan kantornya. Ia harus menjauhi dulu kantor bimbingan belajarnya, ke arah selatan, baru naik angkot yang tidak langsung menuju rumahnya. Hal ini menyebabkan teman-teman sekolahnya heran dan bertanya-tanya “mengapa Jéilah tidak naik angkot seperti biasanya yang jelas-jelas langsung mengantar dia sampai di jalan depan rumahnya?”

Selain itu, pada upacara-upacara di sekolah ia dan teman-teman sekemunitasnya tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan negaranya, dan menolak menghormat pada bendera negerinya. Bagi teman-teman sekemunitasnya, tindakan seperti itu sudah menjadi bagian dari penghayatannya dan sudah dianggap sebagai tindakan yang benar.

Jéilah sendiri sebenarnya merasa tidak nyaman dengan arah pembelajaran yang ia rasa semakin keluar dari kelaziman dan sesungguhnya ia ingin keluar dari komunitas bimbingan belajarnya,

tetapi tidak berani karena hampir setiap saat ia diawasi oleh para mentornya. Mentornya selalu meminta laporan harian mengenai tindakannya menegakkan ajaran agamanya, termasuk sikap dan tindakannya menolak aturan dan ajaran yang berbeda, baik yang diharuskan oleh negara maupun oleh sekolahnya. Sampai satu saat ia ditegur oleh gurunya karena ketahuan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan dan menghormati bendera negaranya pada saat upacara sekolah.

Jéilah pun secara diam-diam menemui gurunya untuk berkonsultasi, apa yang harus dia lakukan supaya ia bisa keluar dari lingkaran komunitasnya, sementara kalau ketahuan berarti nyawa taruhannya?

Sesi III Menyelamatkan Sang Saka

Tujuan	Peserta dapat memahami suka duka perjuangan menegakkan menegakkan bendera merah putih
Metode	Permainan dan Curah pendapat
Waktu	60 menit
Bahan dan Alat	Bendera merah putih yang diikat di tiang Tempat untuk menegakkan tiang bendera Bendera hitam
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok (jumlah kelompok tergantung besar kecilnya jumlah peserta) 2. Fasilitator memasang bendera hitam di ujung ruangan dan bendera merah dibiarkan menggeletak sebelahnya (jarak bendera dengan kelompok peserta lebih kurang 15 meter) 3. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa saja yang sekarang melekat di badan mereka. Jika ada yang menggunakan jaket, minta semua jaket dilepaskan

	<p>4. Fasilitator menjelaskan bahwa setiap kelompok harus berjuang, berlomba mengganti bendera hitam dengan bendera merah putih. Siapa lebih cepat dialah pemenangnya</p> <p>5. Fasilitator menjelaskan cara untuk berjuang mencabut bendera hitam dan menggantinya dengan bendera merah putih</p> <p>6. Fasilitator menjelaskan bahwa semua kelompok mulai berlomba sesudah hitungan ketiga</p>
Refleksi	<p>1. Fasilitator menanyakan bagaimana perasaan peserta mengikuti kegiatan sesi ini, apa kesan mereka?</p> <p>2. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa saja upaya yang dilakukan untuk mengganti bendera hitam dengan bendera merah putih, apa kesulitannya?</p> <p>3. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apakah mereka rela bendera hitam yang berkibar sementara bendera merah putih tergeletak? Mengapa?</p>

Sesi IV Merumuskan Pedoman Pencegahan Dini Ekstrimisme Dengan Kekerasan Di Sekolah

Tujuan	Peserta dapat merumuskan pedoman pencegahan dini terhadap gejala ekstrimisme dengan kekerasan di lingkungan sekolah
Metode	Diskusi kelompok
Waktu	90 menit
Bahan dan Alat	Kertas Plano Spidol Artline Lakban Kertas

<p>Aktivitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator meminta beberapa peserta untuk mereview pelajaran yang sudah diperoleh selama proses pelatihan ini 2. Fasilitator menjelaskan bahwa pelajaran yang sudah didapat selama pelatihan bisa menjadi materi mengenai pokok-pokok pedoman pencegahan ekstrimisme SARA di sekolah 3. Fasilitator membagi peserta menjadi lima kelompok 4. Fasilitator menjelaskan bahwa masing-masing kelompok akan merumuskan pedoman Pencegahan Ekstrimisme dengan Kekerasan di sekolah 5. Sesudah selesai merumuskan hasil diskusinya, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 6. Fasilitator membuka tanya jawab dan diskusi 7. Fasilitator menjelaskan bahwa pokok-pokok pedoman pencegahan ini akan diserahkan kepada perwakilan sekolah (Kepala Sekolah atau perwakilan Diknas) supaya ditindaklanjuti sebagai pedoman umum di lingkungan sekolahnya masing-masing
<p>Refleksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang pentingnya pedoman Pencegahan Ekstrimisme ini, dan kemungkinan efektivitasnya jika diterapkan di sekolah 2. Fasilitator menanyakan kesiapan peserta untuk memperjuangkan agar hasil diskusi mereka bisa diterapkan di sekolah masing-masing

BAHAN DISKUSI KELOMPOK 1

RUMUSKANLAH POKOK-POKOK PEDOMAN PENCEGAHAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH BAGI GURU.

MATERINYA BISA DIAMBIL DARI HASIL-HASIL PELATIHAN, BISA JUGA DARI SUMBER LAIN

BAHAN DISKUSI KELOMPOK 2

RUMUSKANLAH POKOK-POKOK PEDOMAN PENCEGAHAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH BAGI SISWA.

MATERINYA BISA DIAMBIL DARI HASIL-HASIL PELATIHAN, BISA JUGA DARI SUMBER LAIN

BAHAN DISKUSI KELOMPOK 3

RUMUSKANLAH POKOK-POKOK PEDOMAN PENCEGAHAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH BAGI SATPAM SEKOLAH

MATERINYA BISA DIAMBIL DARI HASIL-HASIL PELATIHAN, BISA JUGA DARI SUMBER LAIN

BAHAN DISKUSI KELOMPOK 4

RUMUSKANLAH POKOK-POKOK PEDOMAN PENCEGAHAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH BAGI KARYAWAN/STAF ADMINISTRASI SEKOLAH

MATERINYA BISA DIAMBIL DARI HASIL-HASIL PELATIHAN, BISA JUGA DARI SUMBER LAIN

BAHAN DISKUSI KELOMPOK 5

RUMUSKANLAH POKOK-POKOK PEDOMAN PENCEGAHAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN DI SEKOLAH BAGI LEMBAGA-LEMBAGA YANG MENJADI WADAH AKTIVITAS SISWA

MATERINYA BISA DIAMBIL DARI HASIL-HASIL PELATIHAN, BISA JUGA DARI SUMBER LAIN

LEMBAR BACAAN

RANGKUL: SISTEM DETEKSI DAN RESPON DINI

Secara harfiah, rangkul dapat diartikan sebagai “mendekap” atau “memeluk”. Namun, secara filosofis, kata rangkul dalam program ini mencerminkan sebuah itikad untuk mendekatkan diri dan memberi dukungan bagi komunitas sekolah/madrasah yang rentan terhadap ekstremisme kekerasan agar terhindar dari radikalisme menuju ekstremisme kekerasan. Program ini sejalan dengan:

- Agenda Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Presiden.
- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 3: Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), terutama Pasal 3: PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

- Dalam pelaksanaannya, khusus untuk sekolah/madrasah, program PE ini dapat dilakukan sejalan dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan Formal.

Program ini adalah program yang didesain untuk membantu seluruh stakeholder sekolah/madrasah, mulai dari guru, siswa dan pejabat sekolah/madrasah dalam melakukan upaya deteksi dan tanggap dini atas tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme pada seluruh komunitas sekolah dan - madrasah, khususnya untuk siswa. Sekolah/madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh kembangnya kemampuan kognitif dan perilaku demokratis; sekolah/madrasah juga menjadi tempat dimana tanda-tanda awal radikalisme dapat terlihat dan ditangani. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam kelancaran program ini.

Prinsip-Prinsip RANGKUL

Prinsip RANGKUL disusun berdasarkan empat prinsip:

- **Dialog**

Prinsip pertama dalam melakukan program PE di lingkungan sekolah atau madrasah adalah berdialog dengan siswa yang sudah menunjukkan sinyal-sinyal akan, atau sudah tertarik atau terlibat dalam ide-ide atau kelompok ekstremisme kekerasan. Dialog ini berguna untuk menggali motif dibalik perilaku tersebut. Sinyal-sinyal tersebut dapat terbaca melalui perkataan, tampilan luar dan perilaku siswa. Dari bukti-bukti yang ada selama ini, tidak ada satupun dari masing-masing atau kombinasi dari ketiga karakteristik tersebut yang bisa menjadi indikator pasti perilaku

ekstremisme. Guru dan teman sebaya siswa memiliki peran penting dimana secara sekuensial maupun paralel kedua pihak ini mengidentifikasi dan menggali motif siswa apakah sinyal-sinyal tersebut merupakan bentuk protes atas suatu situasi yang dianggap ketidakadilan, protes pada orang tua, guru atau masyarakat, atau negara? Atau ini adalah bentuk ideologi tertentu yang bisa merupakan ekspresi atas klaim kebenaran tertentu yang menyalahkan pihak di luar kelompoknya, dst. Dialog seperti ini pada hakikatnya adalah dialog wajar yang biasa dilakukan oleh guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Bukan meletakkan posisi guru dan teman sebaya siswa sebagai 'mata-mata', namun guru mencoba memahami perkembangan pemikiran dan psikologis muridnya, sebagaimana sejatinya relasi antara guru dan siswa, di sisi lain teman sebaya siswa berusaha menjadi teman yang baik dengan menunjukkan rasa kepedulian. Hal ini penting untuk menjaga rasa percaya yang dibutuhkan antara siswa dan guru agar mendapatkan kualitas komunikasi.

- **Praktik demokrasi**

Prinsip kedua adalah mempelajari demokrasi dengan cara berpraktik demokrasi, bukan hanya mempelajari konsep, bukan hanya membahas konstitusi apalagi menghafalkan sila-sila Pancasila. Berpraktik demokrasi berarti membiasakan diri mengelola konflik, kontroversi dan menangani perbedaan. Siswa diajak untuk mempelajari bahwa di Indonesia, perbedaan adalah fakta. Oleh karena itu, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah menerima perbedaan pendapat, agama, suku, dan lain-lain, lalu menerima konsekuensi adanya perbedaan termasuk konflik kepentingan, dan berkompromi sebagai solusi atas konflik tersebut. Kemampuan-kemampuan ini dapat disisipkan dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, tanpa harus mengadakan kegiatan khusus.

- ***Do no harm***

Prinsip ketiga adalah melaksanakan pencegahan ekstremisme kekerasan tanpa harus menggunakan cara-cara negatif yang dapat memunculkan bahaya bagi siswa, guru, sekolah/madrasah, orang tua dan lingkungan. Sistem PE di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada netralitas dan terlepas dari prasangka tertentu terhadap perilaku yang diduga mengarah pada ekstremisme kekerasan. Menghargai hak anak sesuai Undang-Undang

- **Menghargai hak anak sesuai Undang-Undang**

Prinsip keempat menekankan sistem PE yang menjamin tumbuh, kembang dan partisipasi siswa sesuai dengan potensinya masing-masing dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah serta memastikan pemenuhan hak siswa atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi kepentingan terbaik siswa sebagai pihak yang paling rentan terhadap radikalisme menuju ekstremisme kekerasan.

- **Pelaksana Program RANGKUL**

Kunci utama lancarnya program RANGKUL adalah keterlibatan dari seluruh pihak, mulai dari pejabat sekolah/madrasah, guru, siswa, komite sekolah/madrasah, tokoh masyarakat dan agama, tenaga profesional dan pemerintah. Pelaksana program RANGKUL adalah Komite RANGKUL, Komite Gabungan dan Jejaring Eksternal.

- **Komite RANGKUL**

Komite RANGKUL adalah unit khusus dengan struktur dan mekanisme kelembagaan tingkat sekolah/madrasah sebagai pelaksana sistem deteksi dan respon dini tingkat sekolah/madrasah. Anggota Komite RANGKUL dipilih berdasarkan kompetensi serta tugas dan fungsinya di sekolah/madrasah. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite

RANGKUL harus memahami betul tata pelaksanaan sistem deteksi dan respon dini dalam RANGKUL ini. Sifat dan masa keanggotaan dapat diatur oleh sekolah/madrasah sehingga memungkinkan terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan melaksanakan program RANGKUL ini oleh kalangan pengajar sekolah/madrasah secara berkelanjutan.

Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok Komite RANGKUL adalah menginisiasi, menjalankan, memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program RANGKUL di sekolah/madrasah

Dalam menjalankan tugasnya, Komite RANGKUL melaksanakan fungsi:

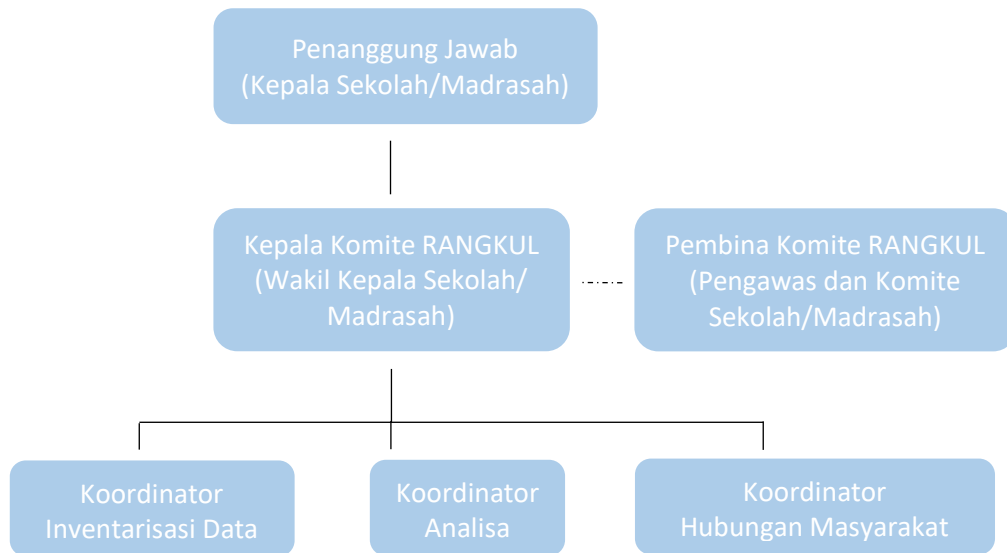
- Pencatatan dan inventarisasi setiap laporan dan dugaan kasus yang masuk ke Komite RANGKUL
- Melakukan prosedur uji sah yang baku dan terstandar terhadap kasus yang telah diinventarisir
- Pengelolaan risiko termasuk menjaga kerahasiaan data yang berhubungan dengan para siswa dan civitas sekolah/madrasah yang berisiko dengan potensi terorisme
- Koordinasi secara berkala dengan Komite Gabungan dan Jejaring Eksternal

Struktur organisasi dan uraian tugas

Jumlah keseluruhan anggota Komite RANGKUL ini terdiri dari 4-5 orang dengan saran keanggotaan sebagai berikut:

- Wakil Kepala Sekolah/Madrasah (sebagai ketua unit)
- Guru BK

- Guru representasi ilmu sosial
- Guru representasi ilmu eksakta
- Guru representasi pendidikan karakter/agama



Gambar Struktur organisasi Komite RANGKUL di sekolah/madrasah

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala masing-masing Sekolah/Madrasah yang bertugas memastikan Komite RANGKUL bekerja menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan protokol, sehingga RANGKUL sebagai sistem deteksi dan respon dini dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Pembina

Pembina dijabat oleh Pengawas dan Komite Sekolah/Madrasah yang memiliki komitmen untuk pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah. Pembina berkewajiban mengayomi, memberi saran, masukan dan pembinaan terhadap Komite RANGKUL terkait deteksi dan respon

dini tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah.

Kepala Komite RANGKUL

Kepala Komite RANGKUL bertugas membuat perencanaan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komite RANGKUL secara keseluruhan, memastikan Komite RANGKUL bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota serta secara aktif membangun dan membina hubungan baik dengan stakeholder.

Koordinator Inventarisasi Data

Koordinator Inventarisasi Data bertugas untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian dan inventarisasi data yang digali oleh anggota Komite RANGKUL atau berdasarkan laporan yang masuk dari komunitas sekolah/madrasah. Data yang masuk dapat berupa hasil observasi, wawancara ataupun temuan-temuan langsung di lapangan terkait intensi, perilaku dan relasi sosial individu yang diduga berpotensi rentan ekstremisme kekerasan. Data yang dikelola dalam bagian ini juga termasuk hasil analisis, pembahasan dan penanganan kasus di internal Komite RANGKUL serta hasil proses rujukan ke Komite Gabungan. Koordinator Inventarisasi Data senantiasa bekerja dengan prinsip kerahasiaan data.

Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus

Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus bertugas mengkoordinasikan tim untuk menguji keabsahan data yang masuk, menganalisis dan membahas kasus yang terkonfirmasi keabsahannya. Bagian ini menjadi sangat krusial karena hasil dari pembahasan kasus ini yang menentukan penanganan seperti apa yang cocok bagi individu yang terkonfirmasi rentan terhadap ekstremisme kekerasan. Bagian ini harus benar-benar menjunjung

prinsip penghargaan terhadap hak individu, empati, tidak menghakimi, demokratis, dan menjaga kerahasiaan data. Komite RANGKUL disiapkan untuk melakukan deteksi dan respon terhadap tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan dengan level “risiko standar” yaitu perilaku umum yang muncul di awal-awal periode inisiasi ekstremisme kekerasan.

Koordinator Hubungan Masyarakat

Koordinator Hubungan Masyarakat bertugas mengoordinasikan kegiatan Komite RANGKUL bersama guru pendidikan karakter/agama dalam hal sosialisasi dan pendidikan terhadap komunitas sekolah/madrasah terkait ekstremisme kekerasan, utamanya terhadap siswa sebagai pihak yang paling rentan terhadap narasi ekstremisme kekerasan. Selain itu, bagian ini juga bertugas untuk berkoordinasi secara langsung kepada Komite Gabungan dalam hal penanganan kasus kategori “merah” yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah/madrasah karena membutuhkan kompetensi khusus untuk mendapatkan asesmen dan intervensi lanjutan. Apabila dari hasil putusan Komite RANGKUL di sekolah/madrasah memutuskan bahwa dugaan perilaku rentan tersebut tidak bersumber dari masalah ideologi ekstremisme kekerasan, namun hal lain, maka dapat dirujuk ke pihak-pihak lain yang dalam protokol ini disebut sebagai Jejaring Eksternal.

Mekanisme Kerja

Langkah 1

Koordinator Hubungan Masyarakat mengoordinasikan anggota Komite RANGKUL bersama guru pendidikan karakter/agama untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan daya lenting (resiliensi) kepada seluruh komunitas sekolah/madrasah.

Langkah 2

Pelaporan kasus oleh guru, siswa ataupun komunitas sekolah/madrasah lainnya kemudian dicatat, didokumentasikan dan diinventarisasi oleh Koordinator Inventarisasi Data sesuai dengan prosedur dan prinsip kerahasiaan data.

Langkah 3

Atas laporan kasus yang masuk, Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus menguji keabsahan data yang masuk, menganalisis dan membahas kasus yang terkonfirmasi keabsahannya. Pengujian dilakukan dengan mengonfirmasi pelapor, terlapor ataupun sumber-sumber lain yang diperlukan. Untuk kasus yang terkonfirmasi keabsahannya, Koordinator Analisa dan Pembahasan Kasus memfasilitasi forum bersama anggota Komite RANGKUL untuk memutuskan rekomendasi penanganan kasus tersebut, apakah masih dapat ditangani sendiri oleh sekolah/madrasah atau dirujuk ke Komite Gabungan/Jejaring Eksternal.

Langkah 4

Untuk kasus yang masih bisa ditangani oleh sekolah/madrasah karena masih berada dalam tahap “risiko standar”, Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus berkoordinasi dengan guru pendidikan karakter/agama untuk memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang terduga rentan terhadap ekstremisme kekerasan melalui setting pengajaran (diskusi, dialog, pendidikan toleransi dsb) atau merujuk kepada pimpinan sekolah/madrasah untuk berdiskusi dan berdialog jika kasus terjadi di level guru sederajat.

Langkah 5

Jika kasus tidak dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah/madrasah karena membutuhkan kompetensi khusus untuk mendapatkan asesmen dan intervensi lanjutan, maka Koordinator Hubungan Masyarakat merujuk kasus tersebut ke Komite Gabungan atau dirujuk ke Jejaring Eksternal jika hasil putusan Komite RANGKUL di

sekolah/madrasah memutuskan bahwa dugaan perilaku rentan tersebut tidak bersumber dari masalah ideologi ekstremisme kekerasan, namun hal lain.

Komite Gabungan

Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Komite Gabungan adalah merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi penanganan lanjutan atas kasus yang dirujuk oleh Komite RANGKUL di sekolah/madrasah

Komite Gabungan bertanggung jawab untuk:

- Berkoordinasi berkala dengan Komite RANGKUL di sekolah dan madrasah
- Memastikan keterwakilan dari setiap lembaga/agensi dalam agenda-agenda Komite Gabungan
- Menjaga hubungan agar koordinasi dan kerjasama antaranggota kelompoknya bisa terjalin dengan baik
- Memastikan dukungan bagi Komite RANGKUL dalam proses identifikasi kasus melalui keterlibatan tim ahli di Komite
- Memastikan besaran dan dimensi dari risiko dari perilaku yang diduga sebagai bagian dari ekstremisme kekerasan akan teridentifikasi, dan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan intervensi yang sesuai
- Memastikan bahwa tindakan intervensi yang harus dilakukan diberikan dengan tepat, dan bahwa persetujuan partisipan sudah didapatkan sebelumnya.
- Memastikan bahwa setiap individu/organisasi yang dalam Komite Gabungan akan berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam rangka memastikan intervensi yang diberikan akan efektif.

Komposisi

Komite Gabungan terdiri dari jejaring tiga pihak. Pertama, pihak otoritas yang berwenang dalam hal menangani isu ekstremisme kekerasan serta pihak Dinas Pendidikan setempat. Kedua, pihak orang tua. Ketiga, tokoh masyarakat/agama dan organisasi masyarakat serta pihak Komunitas-komunitas setempat yang berkepentingan untuk memastikan agar hak-hak anak dan sekolah tidak tercederai sepanjang pelaksanaan program ini.

Mekanisme kerja

- Komite Gabungan dapat berlokasi di salah satu agensi atau institusi anggotanya, namun Ketua Komite Gabungan harus dapat memastikan adanya pertemuan berkala.
- Setiap laporan asesmen harus disampaikan ke seluruh anggota agar semuanya dapat berkontribusi. Adapun mekanisme penyampaian serta penentuan prioritas dapat disusun dengan mengacu pada Perpres tentang PE yang akan dikeluarkan kemudian.
- Pertemuan-pertemuan Komite Gabungan bertujuan menentukan besaran risiko terkait apakah seseorang:
 - Rentan masuk dalam kegiatan ekstremisme kekerasan, sehingga sudah layak mendapatkan intervensi PE
 - Perlu mendapatkan intervensi yang lain, selain PE
 - Dapat dikeluarkan dari daftar kasus yang masuk proses PE oleh Komite Gabungan
- Dalam mempertimbangkan risiko ini, Komite Gabungan perlu memikirkan juga:
 - Risiko yang dihadapi individu karena masuk dalam lingkaran terorisme
 - Risiko yang dihadapi masyarakat dengan masuknya individu tersebut ke dalam lingkaran terorisme

- Setiap kasus diproses dengan selalu mempertimbangkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan tersedia agar dapat menentukan bentuk intervensi yang paling tepat, tanpa melakukan diskriminasi atas agama, gender, suku atau latar belakang individu terkait.
- Seluruh proses, keputusan dan tindakan yang dilakukan Komite harus dicatat dengan rapi dan catatannya harus dapat diakses oleh setiap anggota. Data kasus juga harus disimpan dalam jangka waktu tertentu sepanjang kasus masih terbuka dan beberapa waktu setelah ditutup.

Rencana intervensi

- Setiap kasus akan ditangani secara terpisah, dimana setiap individu yang diputuskan perlu mendapat intervensi, akan menerima bantuan lengkap yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan sesuai hasil identifikasi resikonya. Dengan menggunakan seluruh informasi yang tersedia dan dimiliki, Komite Gabungan akan mendesain intervensi yang menyeluruh termasuk asesmen dan mitigasi risiko yang berpotensi dihadapi oleh pihak pemberi intervensi.
- Desain intervensi yang diberikan oleh Komite Gabungan meliputi tahap tahap berikut:
 - Menyiapkan rencana bagi mitra atau organisasi yang dianggap oleh Komite tepat untuk memberikan intervensi;
 - Menyiapkan instrumen intervensi yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam rencana intervensi sesuai persetujuan bersama;
 - Melakukan review program intervensi;
 - Merevisi atau menghentikan intervensi bilamana dianggap perlu;

- Menjalankan asesmen lanjutan bilamana dianggap perlu, atau ketika persetujuan pemberian intervensi ditolak atau dibatalkan oleh penyedia intervensi
- Resiko yang tercakup dalam konteks PE ini meliputi risiko bagi individu, risiko bagi masyarakat, dan risiko bagi organisasi atau mitra penyedia intervensi. Komite Gabungan bertanggung jawab untuk mengelola risiko-risiko ini dalam kaitannya terhadap individu yang dianggap rentan ekstremisme kekerasan.
- Intervensi dukungan pencegahan ekstremisme kekerasan ini sangat mungkin melibatkan beberapa agensi sekaligus, dimana tiap agensi akan memiliki resikonya masing-masing, dan oleh karena itu Komite Gabungan perlu mengantisipasi semua risiko yang mungkin terjadi dalam desain intervensinya.
- Risiko utama dalam intervensi ini ada di tangan pihak kepolisian karena mereka memang bertugas dan berwenang menangani kasus terorisme di negeri ini. Oleh karena itu, Kepolisian dan BNPT sebagai institusi negara yang khusus menangani terorisme, menjadi bagian yang sangat penting dalam kerja Komite Gabungan.

Persetujuan partisipasi

- Keikutsertaan dalam program Intervensi PE bagi individu yang sudah terkonfirmasi “waspada”, "mengkhawatirkan" atau “bahaya” ini bersifat sukarela. Oleh karena itu, sebelum prosedur intervensi dimulai, individu (atau orang tua/wali dari individu jika belum cukup umur) diminta untuk menandatangani persetujuan intervensi sebelumnya. Setiap individu yang mendapatkan bantuan intervensi program PE ini harus menyadari bahwa program PE ini bertujuan mencegah individu untuk terlibat dalam aksi ekstremisme

kekerasan; apa tujuan program serta apa hasil yang diharapkan dari program ini.

- Sebagai bagian dari menjaga kualitas program, segala informasi yang terkait dengan individu terduga berisiko akan dibagikan kepada anggota Komite Gabungan dan mitra kerjanya, termasuk pihak Kepolisian. Individu (atau orangtua/wali) harus dimintai persetujuannya mengenai hal ini.
- Ketika persetujuan orang tua/wali tidak didapatkan, terutama ketika risiko yang dibawa oleh individu terduga rentan justru berasal dari lingkungan rumah, maka pihak Dinas Sosial setempat harus dilibatkan untuk mendapatkan persetujuan ini, terutama ketika risiko yang diidentifikasi melibatkan mental, fisik, emosi, intelegensi, sosial dan perilaku.

Monitoring dan Evaluasi

- Komite Gabungan bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring intervensi. Individu yang masuk dalam program intervensi harus menjalani asesmen ulang selama sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Bilamana diperlukan asesmen dilakukan lebih sering untuk melihat efektivitas intervensi serta menjadi masukan bagi Komite dalam menentukan kelanjutan intervensi.
- Bilamana Komite merasa tidak puas atas intervensi yang dilakukan selama ini, yaitu bahwa risiko yang dialami individu tidak berkurang, maka kasus ini dapat ditinjau ulang dan rencana intervensi baru dapat disusun kembali. Jika risikonya memang diduga membesar, maka Komite Gabungan dapat mempertimbangkan apakah kasus ini memang tidak sesuai lagi ditangani oleh Komite Gabungan program PE, dan penanganan sepenuhnya oleh Kepolisian sudah diperlukan.

- Bilamana Komite Gabungan merasa puas atas hasil intervensi yang dilakukan mitra, yaitu bahwa risiko yang teridentifikasi sebelumnya telah berkurang atau hilang, maka Komite Gabungan dapat merekomendasikan agar program intervensi ini dihentikan.

Pendanaan

Komite Gabungan secara kolektif bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi Intervensi, namun tidak bertanggung jawab atas pendanaan mitra yang memberikan intervensi. Hal ini sebaiknya diatur lagi dalam Perpres PE, yaitu terkait pendanaan kerja Komite Gabungan dan Mitra penyedia intervensi.

Kerjasama Jejaring

Dalam proses kerjanya, Komite Sekolah/Madrasah, Jejaring Eksternal dan Komite Gabungan akan saling bertukar informasi terkait individu yang teridentifikasi berisiko rentan. Demi menjaga kredibilitas dan validitas program, proses pertukaran informasi ini sebaiknya dibuat berdasarkan protokol pertukaran informasi yang disusun bersama, demi memastikan efektivitas program dan kontribusi dari tiap pihak optimal.

Jejaring Eksternal

Jejaring Eksternal adalah perwakilan dari lembaga sosial, komunitas dan instansi pemerintah yang fokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak dan kesehatan mental misalnya KPAI, Dinas Sosial, BNN, HIMPSI dll.

Proses RANGKUL

Program “RANGKUL” selain memiliki arti mendekatkan diri, juga merupakan akronim dari tahapan deteksi dan respon dini:

Respon dan Rehabilitasi

Tahap awal adalah Respon yang berarti siswa, guru dan komite RANGKUL di sekolah/madrasah tanggap terhadap tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah/madrasah. Namun, perlu diperhatikan baik-baik bahwa responsif tidak berarti tergesa-gesa dalam melakukan justifikasi. Empati dan mengesampingkan prasangka menjadi kunci awal untuk mengenali dan merespon tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan (lihat bagian E 3a poin 3) langkah 2) . Tahap ini juga menjadi titik akhir dari proses RANGKUL yaitu dengan melakukan Rehabilitasi terhadap komunitas sekolah/madrasah yang telah mendapatkan intervensi atau penanganan lebih lanjut oleh Komite Gabungan di luar sekolah/madrasah. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai proses pendampingan agar komunitas sekolah/madrasah tersebut mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah/madrasah.

Analisis

Pada tahap ini, Komite RANGKUL melakukan identifikasi dan uji sah terhadap laporan tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang diterima Komite atau yang ditemukan sendiri oleh anggota Komite. Komite RANGKUL menggunakan instrumen asesmen standar berupa observasi dan wawancara kepada terduga perilaku rentan atau kepada pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.

Narasikan

Komite RANGKUL menarasikan hasil dari asesmen awal dalam bentuk laporan deskriptif secara lengkap mengenai status siswa yang diduga rentan.

Gali

Laporan yang dirujuk ke Komite Gabungan kemudian digali lebih lanjut oleh profesional untuk lebih mendalami gejala spesifik dari perilaku rentan tersebut. Hasil asesmen tersebut berupa konfirmasi laporan Komite RANGKUL. Jika laporan tersebut terkonfirmasi, maka laporan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Komite Gabungan, namun jika laporan tersebut tidak terkonfirmasi, maka kasus tersebut akan di komunikasi kembali ke Komite RANGKUL atau dirujuk langsung ke Jejaring Eksternal.

Kaji Ulang

Komite Gabungan melakukan rapat untuk memutuskan intervensi atau penanganan yang sesuai dengan tetap mempertimbangkan saran dan pandangan dari seluruh pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar intervensi atau penanganan diberikan secara holistik dan tetap memperhatikan hak-hak siswa.

Lakukan

Tahap terakhir dari proses RANGKUL adalah merujuk siswa yang terduga rentan ini ke pihak yang dianggap akan lebih mampu memberikan intervensi yang dibutuhkan untuk mencegah yang bersangkutan terlibat lebih jauh dalam ekstremisme kekerasan. Pada tahap ini, intervensi atau penanganan yang diberikan sesuai dengan hasil keputusan Komite Gabungan. Komite Gabungan dan Komite RANGKUL di sekolah/madrasah harus secara aktif berkomunikasi dan secara bersama-sama memantau perkembangan hasil intervensi tersebut.

